

**PENGARUH PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, TINGKAT
KEPEMILIKAN PEMERINTAH DAN KEKUATAN DEWAN DIREKSI
TERHADAP PELAPORAN ANTI KORUPSI PADA BUMN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Terryarda Laksa Permata Supriyanto

No. Mahasiswa: 15312195

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2019

**PENGARUH PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, TINGKAT
KEPEMILIKAN PEMERINTAH DAN KEKUATAN DEWAN DIREKSI
TERHADAP PELAPORAN ANTI KORUPSI PADA BUMN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata – 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Terryarda Laksa Permata Supriyanto

No. Mahasiswa: 15312195



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, 13 November 2019

Penulis,



(Terryarda Laksa Permaki Supriyanto)

PENGARUH PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, TINGKAT
KEPEMILIKAN PEMERINTAH DAN KEKUATAN DEWAN DIREKSI
TERHADAP PELAPORAN ANTI KORUPSI PADA BUMN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

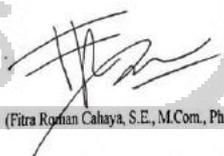
Nama: Terryarda Laksa Permata Supriyanto

No. Mahasiswa: 15312195

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 11 November 2015

Dosen Pembimbing,


(Fitra Rohman Cahaya, S.E., M.Com., Ph.D., CSRS, CSRA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KEPEMILIKAN
PEMERINTAH DAN KEKUATAN DEWAN DIREKSI TERHADAP PELAPORAN ANTI
KORUPSI PADA BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Disusun Oleh : TERRYARDA LAKSA PERMATA SUPRIYANTO

Nomor Mahasiswa : 15312195

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari Rabu, tanggal: 11 Desember 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Fitra Roman Cahaya, SE, M.Com., Ph.D.

Penguji : Dekar Urumsah, Drs., S.Si., M.Com (SI), Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Joko Setyana, SE., M.Si., Ph.D.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” – QS Al-Insyirah: 5-6

“Remember why you started”

“Everyone has their own time, even every leaves has its turn to fall”

“It’s okay not to be okay”

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

PERSEMBAHAN

Penulis mendedikasikan skripsi ini untuk Diri Penulis sendiri yang telah berjuang hingga akhir hingga skripsi ini selesai, Mamah (Ribut) dan Papah (Temok Supriyanto) yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, doa, cinta, kasih dan sayangnya, dan Mas (Terryandra) yang selalu menanyakan kapan sidang.

Sahabat-sahabat yang selama ini selalu bersama Penulis dalam keadaan apapun, terimakasih sudah selalu ada.

Semua pihak yang turut berperan serta dalam membantu kesuksesan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuhu.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melancarkan dan memudahkan proses pengerjaan penelitian ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing umat manusia dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan berkah ilmu pengetahuan untuk senantiasa bersyukur dan melihat kebesaran Allah SWT. Beliau pula yang memberikan banyak ilmu dan ajaran untuk memahami kehidupan. Sungguh peneliti menjadi orang yang beruntung menjadi salah satu dari kaumnya.

Penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Praktik *Good Corporate Governance*, Tingkat Kepemilikan Pemerintah dan Kekuatan Dewan Direksi Terhadap Pelaporan Anti Korupsi Pada BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”** disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik yang terlibat langsung maupun secara tidak langsung, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Papah (Temok Supriyanto) dan Mamah (Ribut) yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, cinta, kasih sayangnya, yang selalu memberikan yang terbaik untukku baik materil dan non-materil.
3. Bapak Dr. Jaka Sriyana., S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Mahmudi., S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fitra Roman Cahaya, S.E., M.Com., Ph.D., CSRS, CSRA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, inspirasi, dan waktu berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat Penulis dari awal perkuliahan (Wulan, Ewith, dan Carissa) yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada Penulis, semoga dimanapun nantinya kita berada, kita akan selalu bahagia.
7. Teman seperjuangan dalam pengerjaan skripsi, Reyngga, yang tidak ada hentinya memberikan dukungan dan mendampingi Penulis dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini.
8. Yulina (Uli) dan Yossyda, teman yang sudah seperti saudara sendiri yang selalu siap membantu dan mendengarkan setiap keluh kesah Penulis dalam dunia perkuliahan ini.
9. Teman-teman pengerjaan skripsi dari awal hingga selesainya skripsi ini, Liska, Renny, dan Erviana yang selalu siap membagikan ilmuny

10. Semua pihak yang turut membantu dalam penulisan ini baik secara materil maupun non-materil. Baik sahabat, maupun pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas waktu, nasihat, do'a dan dukunganya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menerima segala saran dan kritik membangun yang dapat membantu kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuhu.

Yogyakarta, 13 November 2019

Penulis,

(Terryarda Laksa Permata Supriyanto)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Pelaporan Anti Korupsi	8

2.2 Penelitian Terdahulu.....	10
2.3 Teori <i>Coercive Isomorphism</i>	18
2.4 Skema Konseptual	19
2.5 Pengembangan Hipotesis.....	20
2.5.1 Praktik <i>Good Corporate Governance</i>	20
2.5.2 Tingkat Kepemilikan Pemerintah.....	21
2.5.3 Kekuatan Dewan Direksi.....	22
2.5.4 Variabel Kontrol.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
3.1 Populasi dan Sampel.....	24
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	25
3.4.1 Pengukuran Variabel Dependen.....	25
3.4.2 Pengukuran Variabel Independen.....	26
3.4.3 Pengukuran Variabel Kontrol.....	29
3.5 Metode Analisis Data	33
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	33
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	33
3.5.3 Analisis Regresi Berganda.....	35
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
4.2 Hasil Analisis Data	38

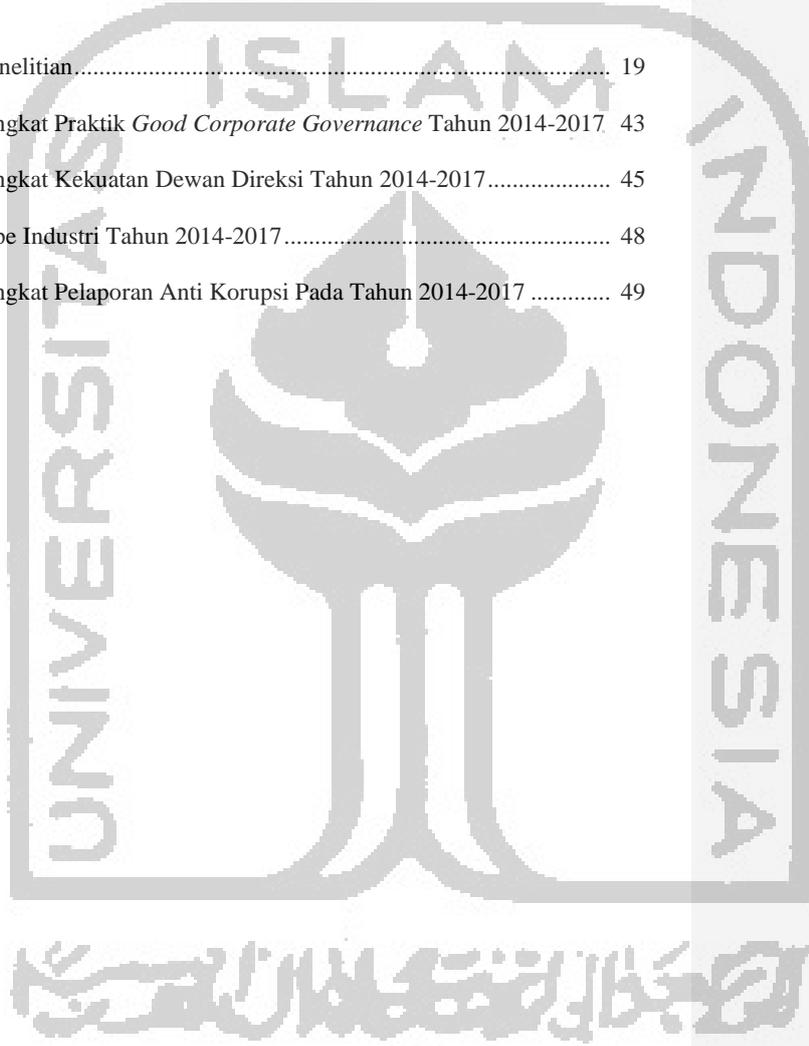
4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	38
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	47
4.3.1 Hasil Uji Normalitas.....	47
4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas.....	48
4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	49
4.4 Hasil Regresi Berganda.....	50
4.5 Interpretasi Hasil.....	51
4.5.1 Praktik <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	52
4.5.2 Kepemilikan Pemerintah.....	53
4.5.3 Kekuatan Dewan Direksi.....	54
4.5.4 Variabel Kontrol.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	60
5.3 Saran.....	60
5.4 Implikasi.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian terdahulu	12
3.1 Teknik Pengukuran Pelaporan Anti Korupsi Penelitian Terdahulu.....	25
3.2 <i>Good Corporate Governance Score</i>	27
3.3 Tabel Pengukuran Tingkat Kepemilikan Pemerintah	29
3.4 Teknik Pengukuran Variabel Kontrol.....	30
3.5 Pengukuran Tipe Industri Penelitian Terdahulu.....	31
3.6 Tabel Risiko Industri	33
3.7 Pengukuran Kinerja Keuangan Penelitian Terdahulu	35
3.8 Pengukuran Ukuran Perusahaan Penelitian Terdahulu	36
4.1 Statistik Deskriptif Variabel Independen Diukur Secara <i>Continuous</i>	42
4.2 Statistik Deskriptif Variabel Independen Diukur Secara Kategorikal	44
4.3 Statistik Deskriptif Variabel Kontrol Diukur Secara <i>Continuous</i>	46
4.4 Statistik Deskriptif Variabel Kontrol Diukur Secara Kategorikal	48
4.5 Statistik Deskriptif Variabel Dependen Secara <i>Continuous</i>	49
4.6 Hasil uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	51
4.7 Hasil uji Multikolinieritas	52
4.8 Hasil uji Heteroskedastisitas.....	53
4.9 Hasil Regresi Berganda.....	54
4.10 Hasil Uji Hipotesis.....	57
5.1 Ringkasan Hasil Penelitian	63

DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Penelitian.....	19
4.1 Grafik Tingkat Praktik <i>Good Corporate Governance</i> Tahun 2014-2017.....	43
4.2 Grafik Tingkat Kekuatan Dewan Direksi Tahun 2014-2017.....	45
4.3 Grafik Tipe Industri Tahun 2014-2017.....	48
4.3 Grafik Tingkat Pelaporan Anti Korupsi Pada Tahun 2014-2017.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan GRI Aspek Anti Korupsi	71
Lampiran 2 Penelitian Terdahulu untuk Menentukan Pelaporan Anti Korupsi	79
Lampiran 3 Daftar Perusahaan Sampel Yang Menerbitkan Sustainability Report.....	85
Lampiran 4 Daftar Perusahaan Sampel	87
Lampiran 5 Tabel <i>Corporate Governance Score</i>	89
Lampiran 6 Variabel Dependen Pelaporan Anti Korupsi	90
Lampiran 7 Variabel Independen Praktik <i>Good Corporate Governance</i>	96
Lampiran 8 Variabel Independen Kepemilikan Pemerin.....	102
Lampiran 9 Variabel Independen Kekuatan Dewan Direksi	106
Lampiran 10 Variabel Kontrol Tipe Industri	110
Lampiran 11 Variabel Kontrol Kinerja Keuangan.....	114
Lampiran 12 Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan.....	118
Lampiran 13 Output SPSS	122
Lampiran 14 Verifikasi Data.....	129

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus kepada *corporate social responsibilty* (CSR) aspek sosial perusahaan dan bertujuan untuk menganalisa pengaruh aktifitas pelaporan anti korupsi dalam laporan keuangan yang menggambarkan komitmen perusahaan dalam melawan korupsi. Adanya keterbatasan dari penelitian terdahulu mengenai pelaporan anti korupsi perusahaan menjadi motivasi dalam penelitian ini.

Sampel penelitian ini terdiri dari 20 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2017. Input data dilakukan pada laporan tahunan perusahaan dan *sustainability report* bagi perusahaan yang menerbitkannya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan software SPSS untuk menguji hipotesis penelitian.

Hasil analisis statistik menyatakan bahwa praktik *good corporate governance*, dan tingkat kepemilikan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan anti korupsi. Teori *coercive isomorphism* secara parsial menjelaskan hubungan variabel-variabel dari pelaporan anti korupsi.

Kata kunci: *pelaporan anti korupsi, praktik good corporate governance, kepemilikan pemerintah, kekuatan dewan direksi, dan coercive isomorphism.*

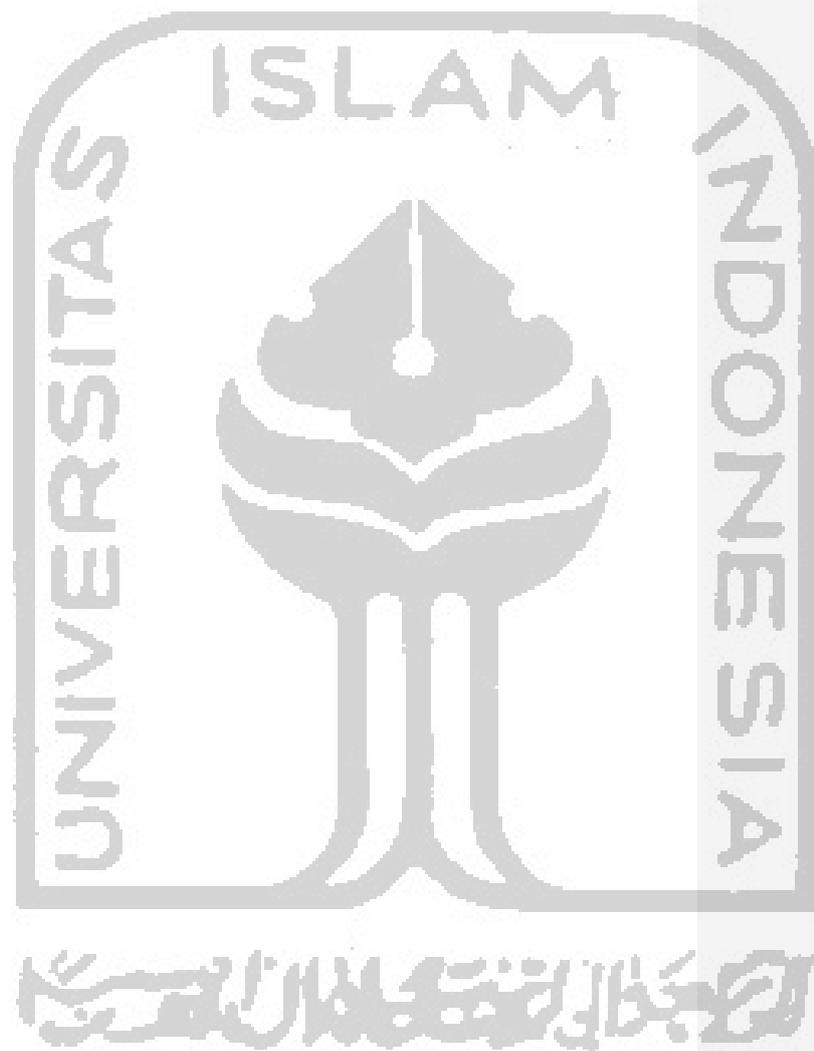
ABSTRACT

This paper focus ono corporate social responsibility (CSR) branches social in company and it's aims to examination the extent of anti-corruption disclosure in annual reports that demonstrate organizational commitment towards combatting corruption. The limitations of the prior research, about anti-corruption disclousere become a motivation of this study.

The sampe consists of 20 companies from the IDX-listed government company for 2014-2017. The input data was based on obsevation of companies annual report and sustainability report for companies that disclose it. This study used multiple refression analysisi with SPSS software to test the proposed hypotheses.

The statistic analysis result indicate that good corporate governance practice, and government-ownership is a positively significant predictor of anti-corruption disclosure. The coercive isomorphism theory partially explains the variability pf these disclosure.

Keyword: *anti-corruption disclosure, good corporate governance practice, power of director, coercive isomorphism*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek keberlanjutan (*sustainability*) yang mungkin belum banyak diketahui oleh komunitas bisnis adalah aktivitas dan kebijakan anti korupsi. Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebenarnya telah mengatur aktivitas keberlanjutan dan pelaporannya di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK/03/2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Sebelumnya, pada tahun 2007, Pemerintah mulai mengatur praktik dan pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang merupakan bagian dari konsep keberlanjutan, dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Namun, peraturan-peraturan tersebut hanya menyebutkan bahwa perusahaan wajib melakukan aktivitas keberlanjutan dan/atau CSR dan melaporkannya dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan, tidak menyebutkan aspek keberlanjutan mana yang harus dilakukan dan dilaporkan. Oleh karena itu, wajar bila aspek korupsi ini tidak dianggap sebagai aktivitas CSR oleh banyak kalangan. Pelaporan anti korupsi sendiri bisa dianggap masih bersifat sukarela, karena peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan CSR dan keberlanjutan tidak menyebutkan secara spesifik kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi anti korupsi.

Isu korupsi menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Korupsi bisa terjadi baik di sektor publik maupun sektor swasta. Kaitannya dengan sektor swasta, *Transparency International* (2009) berpendapat bahwa pelaporann

anti-korupsi pada perusahaan merupakan indikator kuat dari kualitas dan kelengkapan upaya perusahaan dalam memerangi dan menangani korupsi. Ironisnya, di Indonesia, kasus korupsi justru banyak terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik yang terdaftar di pasar modal maupun tidak. Contohnya, kasus korupsi yang menjerat Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) I Ketut Suarbawa yang menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Jembatan Bangkinang, Kabupaten Kampar (Rachman, 2019a). Kasus korupsi lainnya juga menjerat Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), Wisnu Kuncoro yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa (Budhiman, 2019).

Melihat banyaknya BUMN yang terjerat korupsi pemerintah seharusnya memiliki komitmen yang tinggi dan tegas dalam memberantas praktik korupsi. Salah satu bentuk komitmen pemerintah tertuang pada UU NO. 28 tahun 1999 yang fokus pada pembersihan dan pembebasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam administrasi negara. Selain itu BUMN juga perlu melakukan evaluasi apakah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah diterapkan dengan baik. Prinsip-prinsip GCG yang disusun Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), yaitu meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran. BUMN sebagai perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah harusnya menjadi acuan untuk perusahaan swasta dalam upaya memberantas korupsi. Sayangnya, kasus yang menimpa Direktur keuangan PT

Angkasa Pura II Andra Y Agussalam¹, terkait dugaan menerima suap sebesar 96.700 dollar Singapura atau hampir Rp 1 miliar, semakin memperlihatkan betapa lemahnya komitmen anti korupsi pada BUMN. Hal ini menjadikan pentingnya penelitian mengenai pelaporan anti korupsi pada BUMN.

Tingkat kepemilikan pemerintah didalam perusahaan diharapkan mampu menekan perusahaan untuk mengungkapkna informasi, termasuk agar perusahaan mengungkapkan pelaporan anti korupsi. Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator diharapkan mampu menekan perusahaan untuk mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR. Amran dan Devi (2008) meneliti mengenai kepemilikan pemerintah terhadap tingkat pelaporan CSR.

Kekuatan dewan direksi semestinya juga mampu menekan perusahaan untuk melakukan praktik tertentu agar sesuai dengan kepentingan dewan direksi. Dewan direksi akan merasakan dampak langsung dari setiap keputusan yaang mereka ambil, hal ini membuat dewan direksi akan melaporkan pelaporan anti korupsi. La (2019) meneliti mengenai pengaruh kekuatan dewan direksi terhadap kinerja CSR.

Penelitian yang menguji mengenai pengaruh CSR sudah banyak dilakukan sebelumnya, tetapi belum banyak penelitian mendalam mengenai pelaporan anti korupsi, utamanya pada BUMN. Beberapa penelitian tersebut antara lain penelitian

¹ Andra menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan baggage handling system (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP) yang dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), pemberian uang suap bertujuan agar Andra mengupayakan PT INTI menjadi pelaksana pekerjaan dalam pengadaan dan pemasangan semi baggage handling system (BHS) untuk 6 bandara (Rachman, 2019b) .

yang dilakukan oleh Islam, Haque, dan Gilchrist (2017) mengenai praktik pelaporan anti korupsi di negara Australia, D'onza, Brotini, dan Zarone (2017) mengenai praktik pelaporan korupsi di negara Italia dan Gunawan dan Joseph (2017) mengenai praktik pelaporan anti korupsi di negara Indonesia. Semua penelitian tersebut tidak ada yang meneliti pengungkapan anti korupsi pada BUMN di Indonesia.

Digunakannya BUMN sebagai sampel menjadi sangat penting mengingat banyaknya manajemen atau pengelola perusahaan BUMN yang terlibat kasus korupsi. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Praktik *Good Corporate Governance*, Tingkat Kepemilikan Pemerintah dan Kekuatan Dewan Direksi terhadap Pelaporan Anti Korupsi pada BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

- 1) Apakah praktik *good corporate governance* berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi pada BUMN?
- 2) Apakah tingkat kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi pada BUMN?

- 3) Apakah kekuatan dewan direksi berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi pada BUMN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji pengaruh praktik *good corporate governance* terhadap pelaporan anti korupsi.
- 2) Untuk menguji pengaruh tingkat kepemilikan pemerintah terhadap pelaporan anti korupsi.
- 3) Untuk menguji pengaruh kekuatan dewan direksi terhadap pelaporan anti korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan pelaporan anti korupsi pada BUMN.
- 2) Bagi manajemen, penelitian ini bisa menjadi tinjauan literatur yang diharapkan dapat menjadi informasi untuk mengembangkan sistem pencegahan korupsi dalam perusahaan berikut mekanisme pelaporannya.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini bisa menjadi sarana informasi dan menambah pengetahuan mengenai aktivitas CSR yang berfokus pada pelaporan anti korupsi perusahaan.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Penelitian ini disusun secara terperinci untuk memberikan wawasan dan gambaran yang sistematis untuk mempermudah pembahasan. Sistematika untuk kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab II membahas teori secara terperinci mengenai landasan teori tentang, pelaporan anti korupsi, praktik *good corporate governance*, kekuatan dewan direksi, tingkat kepemilikan pemerintah dan teori *coercive isomorphism* serta perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III membahas tentang populasi dan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, model penelitian, hipotesis serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab IV membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan dan analisis penelitian

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab V membahas mengenai kesimpulan yang diambil dalam penelitian tersebut, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Pelaporan Anti Korupsi

Korupsi merupakan masalah serius diseluruh dunia. Menurut *Corruption Perception Indeks* (CPI) tahun 2018 yang diambil dari *Transparency International* (2018) Indonesia menempati peringkat 89 dari 180 negara dengan dengan nilai 38. Hasil tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia yang masih tinggi. Untuk mengurangi tingkat korupsi, dibutuhkan peraturan dan regulasi yang tepat dan diterapkan dengan konsisten. Pemerintah telah membuat banyak upaya untuk memperbaiki situasi ini dengan mengembangkan banyak peraturan. Tiga lembaga terkemuka di Indonesia yang menggalakkan program anti korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Transparency International Indonesia.

Pemerintah Indonesia dan pihak berwenang lainnya berkomitmen untuk melawan korupsi dan penyuapan. Beberapa inisiatif hukum telah ditetapkan untuk mempromosikan program-program anti korupsi, sebagai berikut:

1. UU No. 8 tahun 2010 fokus pada pencegahan dan pemberantasan aktivitas kejahatan pencucian uang.
2. UU No. 46 tahun 2009 yang fokus pada pengadilan aktivitas korupsi.
3. UU No. 30 tahun 2002 yang berisi Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. UU NO. 28 tahun 1999 yang fokus pada pembersihan dan pembebasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam administrasi negara

5. UU No. 7 tahun 2006 yang berisi pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

6. UU No. 20 tahun 2001 yang berisi amandemen dari UU No. 31 tahun 1999 (Pemberantasan Kejahatan Aktifitas Korupsi)

Selain membuat undang-undang, langkah legal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang menjadi bagian dari pencegahan korupsi yaitu sebagai berikut ini:

1. *National Guidance of Good Corporate Governance*, dikeluarkan oleh komite nasional *governance policy* pada tahun 2006.

2. *Capital Market Supervisory Board* melalui surat edarannya No. SE-03/PM/2000 direkomendasikan untuk perusahaan publik agar melakukan komite audit.

3. Bank Indonesia mengeluarkan regulasi Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang berisi implementasi implementasi kode *corporate governance* untuk bank umum.

4. Kebijakan tata kelola BUMN, termasuk surat edaran dari menteri BUMN No. 106 tahun 2000 dan dekrit Kementrian BUMN No. 23 tahun 2000. Sebagai tambahan, pemerintah juga mengeluarkan dekrit Kementrian BUMN No. 103 tahun 2002 yan berisi stabilisasi komite audit.

5. Roadmap tata kelola pemerintahan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK tahun 2003.

6. Strategi nasional untuk mencegah korupsi dalam aturan medium (2012-2014) dan jangka panjang (2012-2025) mengenai strategi pencegahan.

strategi pelaksanaan undang-undang, strategi harmonisasi regulasi, strategi kerjasama internasional dan penyelamatan asset, strategi edukasi anti korupsi dan budaya, dan strategi mekanisme pelaporan anti korupsi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pelaporan anti korupsi digunakan sebagai acuan dan ide dalam melakukan penelitian ini. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Islam et al. (2017) mengenai “Organisasi nirlaba dan praktik pengungkapan anti korupsi”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa organisasi enggan untuk mengungkapkan catatan korupsi mereka, dan kebijakan serta prosedur anti-korupsi yang ada untuk menjaga transparansi dan tata kelola yang baik. Peneliti berargumen bahwa hal tersebut mungkin disebabkan oleh tidak adanya peraturan wajib pengungkapan anti korupsi, organisasi-organisasi Australia akan tetap enggan untuk mempublikasikan rincian langkah-langkah anti korupsi yang mereka miliki. Sampel terdiri dari 20 anggota terbesar (berdasarkan pendapatan) dari 94 anggota ACFID tahun 2013.

Penelitian yang dilakukan Joseph et al. (2016) mengenai “Perbandingan penelitian praktik pengungkapan anti korupsi pada aktivitas *corporate social responsibility* perusahaan-perusahaan di Malaysia dan Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mengungkapkan lebih banyak informasi pengungkapan anti korupsi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di Malaysia. Peneliti berargumen bahwa hal tersebut disebabkan oleh tingginya tekanan untuk mengungkapkan informasi anti korupsi di Indonesia dibandingkan di Malaysia. Data di input berdasarkan observasi laporan

tahunan dari beberapa organisasi, laporan keberlanjutan, literatur sebelumnya dan indikator Global Reporting Initiative (GRI). Sampel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 34 perusahaan Indonesia yang berpartisipasi dalam Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) dan 24 perusahaan Malaysia yang berpartisipasi dalam ACCA Malaysia Sustainability Report (MaSRA).

Penelitian yang dilakukan Islam, Haque, Dissanayake, Leung, dan Handley (2015) mengenai “Pengungkapan perusahaan dalam kaitannya dengan memerangi suap perusahaan: studi kasus dua perusahaan telekomunikasi Tiongkok”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Tiongkok menunjukkan tren peningkatan dalam pengungkapan upaya mereka untuk memerangi penyuapan. Peneliti berargumen bahwa hal tersebut disebabkan oleh perhatian media global mengenai praktik penyuapan di industri telekomunikasi Tiongkok. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua perusahaan telekomunikasi di Tiongkok yaitu China Mobile dan ZTE Corporation.

Penelitian yang dilakukan D'onza et al. (2017) mengenai “Pengungkapan tentang langkah-langkah untuk mencegah resiko korupsi: sebuah studi pemerintah daerah Italia”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat pengungkapan langkah-langkah anti korupsi secara positif terkait dengan persentase direktur eksternal dalam suatu badan pemerintah daerah. Peneliti berargumen bahwa hal tersebut disebabkan oleh pandangan bahwa pengungkapan adalah sarana yang oleh para direktur dapat menunjukkan kepada para pemangku kepentingan mereka bahwa mereka bertindak secara optimal. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pemerintah daerah Italia.

Rangkuman penelitian terdahulu mengenai pelaporan anti korupsi dapat dilihat pada Tabel 2.1:



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Teori	Sumber Data	Sampel	Variabel	Hasil
1.	Halter, de Arruda, dan Halter (2009)	Tidak disebutkan	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara perwakilan perusahaan • Wawancara dengan suplier 	Perusahaan multinasional yang ada di Brazil dengan jumlah karyawan 40.000 diseluruh dunia.	<u>Dependen:</u> Korupsi <u>Independen:</u> Transparansi	Salah satu inisiatif mengurangi korupsi paling penting dapat dengan jelas diberikan oleh transparansi informasi dan komunikasi kode etik dalam organisasi.
2.	Hess (2009)	Tidak disebutkan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keberlanjutan • Pelaporan anti korupsi 	Perusahaan sektor privat	Dependen: Korupsi Independen: Prinsip perusahaan	Sektor publik perlu mengeksplorasi cara-cara itu dapat mempengaruhi adopsi dan implementasi prinsip-prinsip perusahaan untuk benar-benar mengatalisasi komitmen perusahaan untuk memerangi korupsi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Lanjutan

3.	Barkemeyer, Preuss, dan Lee (2015)	Teori Institutional	Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan	Tujuh sektor perusahaan (perbankan; konstruksi; listrik; logam industri; pertambangan; minyak & gas dan akhirnya gas, air & multi-utilitas) yang menerbitkan laporan tahunan dan keberlanjutan pada tahun 2006-2009.	<p>Dependen: Indikator GRI SO2, SO3, dan SO4</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekanan tingkat negara dan tingkat regional • Tekanan tingkat sektoral • Tekanan global 	Perusahaan-perusahaan Asia Selatan dan Timur ternyata memiliki tingkat cakupan indikator GRI yang tinggi tentang korupsi, sedangkan negara-negara Eropa Timur menunjukkan tingkat yang sangat rendah
4.	Blanc, Branco, dan Patten (2016)	Tidak disebutkan.	laporan transparansi perusahaan dan pelaporan anti korupsi	Perusahaan Amerika yang ada di Transparency International dan menerbitkan laporan transparansi perusahaan dan pelaporan anti korupsi.	<p>Dependen: Pengungkapan Anti-Korupsi</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paparan Media • Kebebasan per 	Reaksi pasar rata-rata terhadap rilis laporan TI pertama adalah negatif dan signifikan secara statistik.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Lanjutan

5.	Healy dan Serafeim (2016)	Tidak disebutkan.	Pengungkapan antikorupsi perusahaan berasal dari Transparency International (TI)	500 perusahaan terkemuka dari Forbes Maret 2007 Global 2000, termasuk 250 perusahaan terbesar yang terdaftar, 107 perusahaan dari sektor berisiko tinggi, dan 143 perusahaan dari 25 negara pengeksport global teratas.	<p>Dependen:</p> <p>Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Peringkat Anti korupsi perusahaan</p> <p>Independen:</p> <p><i>Corporate Governance</i></p>	<p>Perkiraan korupsi di negara asal positif menyiratkan bahwa perusahaan-perusahaan dari negara asal yang kurang korup memiliki peringkat lebih tinggi.</p> <p>Peningkatan persentase direktur independen berkaitan dengan peningkatan peringkat antikorupsi.</p>
6.	Blanc, Islam, Patten, dan Branco (2017)	Tidak disebutkan.	<ul style="list-style-type: none"> Dow Jones Factiva database. 	Peringkat Transparency International tahun 2012 tentang pengungkapan anti korupsi oleh 105 perusahaan multinasional terbesar di dunia	<p>Dependen:</p> <p>Pengungkapan anti korupsi</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paparan media Kebebasan press 	<p>Paparan media secara positif terkait dengan perbedaan dalam pengungkapan anti-korupsi perusahaan sampel.</p> <p>Pengungkapan kurang luas di mana kebebasan pers negara asal lebih dibatasi dan berkurangnya kebebasan pers tampaknya mengurangi dampak paparan media terhadap pengungkapan tersebut.</p>

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Lanjutan

7.	Gunawan & Joseph (2017)	<i>Coercive isomorphism</i>	Forum group interview 10 perusahaan dengan praktik CSR terbaik	10 perusahaan dinominasikan dalam Indonesia CSR Award 2014	<p>Dependen: Praktik anti korupsi</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan berdasarkan industri • Perusahaan berdasarkan kepemilikan 	Praktik ACP di perusahaan praktik berbasis CSR di Indonesia berlaku untuk aktivitas bisnis umum dan tidak khusus untuk aktivitas CSR, seperti amal, sponsor, donasi, dan keterlibatan masyarakat.
8.	Islam, Dissanayake, Dellaportas, dan Haque (2018)	Teori Legitimasi Teori <i>Media-agenda setting</i>	Laporan keberlanjutan Perusahaan di sektor telekomunikasi dari tahun 1995-2010	Perusahaan di sektor telekomunikasi dari tahun 1995-2010	<p>Dependen: Pengungkapan <i>anti-bribery</i></p> <p>Independen: Perhatian media terhadap perusahaan</p>	Pengungkapannya secara signifikan terkait dengan perhatian media.

T

9.	Issa dan Alleyne (2018)	Teori Institusional	Laporan keberlanjutan 66 perusahaan Gulf Council Council (GCC) tahun 2014.	66 perusahaan Gulf Council Council (GCC) tahun 2014.	Dependen: Praktik pengungkapan anti korupsi Independen: <i>Good Corporate Governance</i>	Peningkatan signifikan dalam pentingnya pelaporan anti-korupsi sebagai cara mengurangi korupsi, secara global.
----	-------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Teori Coercive Isomorphism

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Joseph (2017) skripsi ini mengadopsi *coercive isomorphism* sebagai kerangka teoritis yang melandasi pengembangan hipotesis yang diuji. *Isomorphism* merupakan satu dimensi dari teori institusional yang menjelaskan bahwa, dalam konteks pengungkapan informasi, suatu organisasi mendapatkan tekanan institusional untuk mengungkapkan informasi sehingga organisasi tersebut melakukan berusaha melakukan adaptasi untuk merespon tekanan tersebut (Dimaggio dan Powell, 1983). Salah satu sumber tekanan ini bisa berasal dari *stakeholder*² kunci. Tekanan semacam ini disebut *coercive isomorphism* (Dimaggio dan Powell, 1983). *Coercive isomorphism* merupakan hasil dari tekanan, baik yang bersifat formal maupun informal, yang diberikan kepada suatu organisasi oleh organisasi lain atau individu dimana organisasi tersebut sangat bergantung kepada pihak-pihak tersebut (Dimaggio dan Powell, 1983). Contoh dari tekanan formal adalah aturan-aturan yang tertulis, seperti UU. Sedangkan contoh dari tekanan informal adalah aturan-aturan yang tidak tertulis.

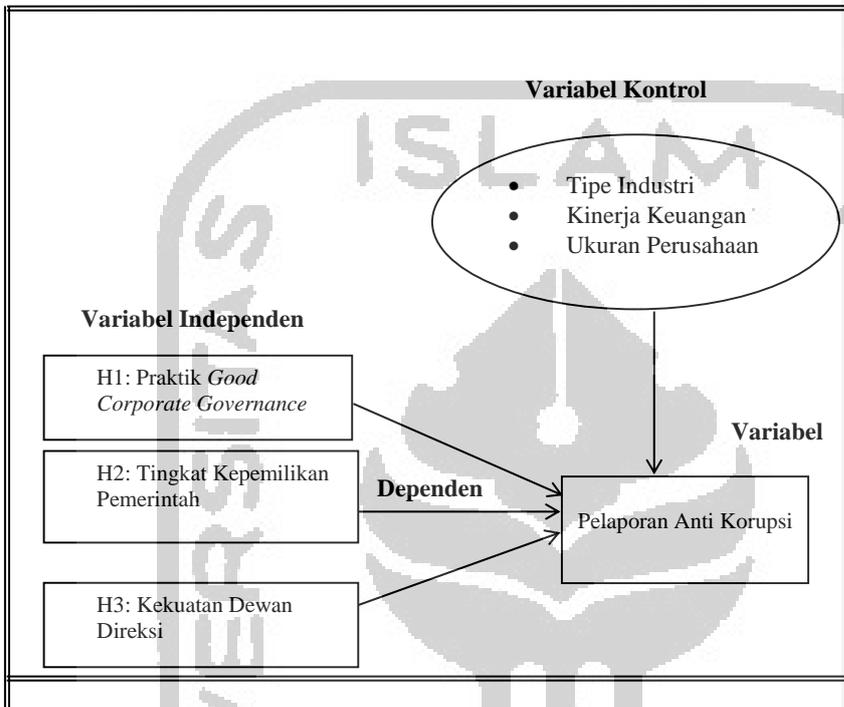
Tekanan baik tersebut bisa bersifat persuasif, paksaan dan kolusi. Pada *coercive isomorphism*, kekuatan stakeholder memegang peran penting yang memaksa perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik kelembagaan tertentu (misalnya pengungkapan CSR) supaya terlihat sama dengan perusahaan lain yang

² Freeman (1984) mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu apa pun yang dapat memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh aktivitas dan/atau kebijakan organisasi, seperti kreditur, karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan pemerintah.

beroperasi di lingkungan institusi yang sama. Tekanan yang bersifat koersif berasal dari berbagai sumber seperti peraturan hukum dan aturan politik masyarakat luas.

2.4 Skema konseptual

Skripsi ini menguji pengaruh tiga variabel independen, yaitu praktik *good corporate governance*, tingkat kepemilikan pemerintah, dan kekuatan dewan direksi, terhadap tingkat pelaporan anti korupsi di dalam kerangka teori *coercive isomorphism*. Selain itu, skripsi ini juga mengadopsi tipe industri, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Skema konseptual yang menggambarkan seluruh set variabel independen, kontrol, dan dependen dalam skripsi ini disajikan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Skema Konseptual

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Praktik *Good Corporate Governance*

Perusahaan yang memiliki *good corporate governance* yang baik akan mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Investor lebih percaya terhadap perusahaan yang memiliki praktik *good corporate governance* yang baik dibandingkan dengan perusahaan dengan perusahaan yang memiliki praktik *good corporate governance* yang buruk (Arifin, 2003).

Dalam teori *coercive isomorphism* bahwa perusahaan akan mendapatkan tekanan dari stakeholder yang terefleksikan dalam indikator *corporate governance score*. Ketika perusahaan mendapatkan tekanan maka tekanan tersebut akan membuat perusahaan melaporkan pengungkapan anti korupsi. Pernyataan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Jayanti (2016) menunjukkan hubungan yang positif bahwa GCG mempengaruhi luasnya pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan Healy dan Serafeim (2016) bahwa praktik *good corporate governance* berkaitan dengan peningkatan peringkat anti korupsi. Penelitian Bernardi dan Threadgill (2011) juga menunjukkan bahwa praktik *good corporate governance* menunjukkan hubungan yang positif terhadap pengungkapan CSR. Oleh karena GCG berpengaruh terhadap CSR, Peneliti beranggapan bahwa GCG juga akan berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi. Berdasarkan argumen yang telah dipaparkan diatas dan penelitian sebelumnya, skripsi ini memprediksikan hipotesis berikut ini:

H1: Praktik *good corporate governance* memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat pelaporan anti korupsi.

2.5.2 Tingkat Kepemilikan Pemerintah

Tingkat Kepemilikan pemerintah merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam teori *coercive isomorphism* tingkat kepemilikan pemerintah yang tinggi mencerminkan potensi kekuatan pemerintah dalam menekan perusahaan untuk melakukan praktik tertentu, termasuk praktik pengungkapan anti korupsi. Melalui kepemilikan ini, pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan agar sesuai dengan

kepentingan pemerintah untuk melaporkan pelaporan , termasuk pelaporan anti korupsi.

Penelitian yang dilakukan Amran dan Devi (2008) menunjukkan hubungan positif dan signifikan kepemilikan pemerintah dengan tingkat pelaporan sosial di Malaysia. Cahaya et al. (2012) juga menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah yang berkaitan dengan buruh dalam hubungan yang positif. Berdasarkan argumen yang telah dipaparkan diatas dan hasil penelitian sebelumnya, skripsi ini memprediksikan hipotesis berikut ini:

H2 : Tingkat kepemilikan pemerintah memiliki hubungan yang positif dengan tingkat pelaporan anti korupsi.

2.5.3 Kekuatan Dewan Direksi

Kekuatan dewan direksi yang direfleksikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh dewan direksi dianggap mampu memberikan kontribusi terhadap pelaporan anti korupsi perusahaan. Dalam teori *coercive isomorphism* ketika semakin besar jumlah saham yang dimiliki oleh direksi maka dewan direksi akan merasakan dampak langsung dari setiap keputusan yang mereka ambil, hal ini menyebabkan tekanan terhadap direksi untuk mengungkapkan pelaporan anti korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh La (2019) menyatakan bahwa kekuatan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja CSR. Oleh karena kekuatan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja CSR, Penulis beranggapan bahwa kekuatan dewan direksi juga akan berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi.

Berdasarkan argumen yang telah dipaparkan diatas dan penelitian sebelumnya, skripsi ini memprediksikan hipotesis berikut ini:

H3 : Kekuatan dewan direksi memiliki hubungan yang positif terhadap pelaporan anti korupsi

2.5.4 Variabel Kontrol

Skripsi ini juga menguji tipe industri, ukuran perusahaan, dan kinerja keuangan, sebagai variabel kontrol untuk diuji dalam analisis statistik. Semakin baik kinerja keuangan perusahaan, maka perusahaan akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang besar dapat mengungkapkan lebih banyak informasi sosial karena mereka berinteraksi dengan banyak pemangku kepentingan (Cahaya, Porter, dan Brown, 2008). Industri yang mempunyai tipe industri yang berbeda menghadapi risiko korupsi berbeda dalam operasinya. Perusahaan dari beberapa industri lebih mungkin untuk berinteraksi dengan pemerintah yang berhubungan dengan penjualan barang atau jasa atau negosiasi lainnya, dan karenanya, menghadapi risiko korupsi yang lebih besar (Healy dan Serafeim, 2016).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014 sampai 2017. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Terdapat kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu:

- Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2017.
- Perusahaan BUMN yang laporan tahunannya berturut-turut selama tahun 2014 sampai 2017 dapat diakses.
- Perusahaan BUMN yang tidak mengalami merger selama tahun 2014 sampai 2017.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2014 sampai 2017. Bila perusahaan BUMN tidak memiliki laporan keberlanjutan, sumber data pengungkapan informasi cukup diambil dari laporan tahunan saja.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan data empiris yang dominan bersumber dari laporan tahunan perusahaan dan laporan keberlanjutan bagi perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2014 sampai 2017.

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.4.1 Pengukuran Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaporan anti korupsi. Variabel dependen ini diukur dengan menggunakan *content analysis*. Pendekatan *content analysis* yang digunakan telah diterapkan dalam penelitian sebelumnya untuk mengumpulkan informasi anti korupsi dari laporan tahunan dan memeriksa tingkat pengungkapan (Joseph et al., 2016). *Content analysis* adalah teknik kodifikasi teks dari sepotong tulisan ke dalam kelompok berdasarkan kriteria yang dipilih (Guthrie dan Abeysekera, 2006). Tabel 3.1 menunjukkan beberapa penelitian terdahulu mengenai pengukuran pelaporan anti korupsi.

Tabel 3.1 Teknik Pengukuran Pelaporan Anti Korupsi Penelitian Terdahulu

Peneliti	Negara	Pengukuran
Islam et al., (2017)	Australia	Content Analysis
Joseph et al., (2016)	Indonesia & Malaysia	Content Analysis
Islam et al., (2015)	Tiongkok	Content Analysis
D'onza et al., (2017)	Italia	Content Analysis

Konsisten dengan penelitian terdahulu mengenai pelaporan anti korupsi, skripsi ini juga mengadopsi *content analysis* untuk mengukur pelaporan anti korupsi. Unit analisis yang digunakan merupakan jumlah kata, sesuai dengan

penelitian (Gao, Heravi, dan Xiao, 2005). Teknik ini membuat peneliti harus membaca laporan tahunan perusahaan untuk mencari item informasi yang sesuai dengan *checklist* yang ditemukan, kemudian akan dihitung jumlah katanya. Checklist pengungkapan yang digunakan dalam skripsi ini merupakan *checklist* yang ada didalam *guideline Global Reporting Index (GRI)* versi G4 pada komponen korupsi, yaitu: (G4-SO3) risiko korupsi, (G4-SO4) pelatihan dan prosedur serta (G4-SO5) kebijakan anti korupsi serta insiden korupsi dan tindak lanjutnya (Global Reporting Initiative, 2013).

Pada tahun 2016, GRI mengeluarkan guideline versi terbaru yg diberi nama Standar GRI (GRI, 2016). Untuk tujuan penelitian ini, acuan yg digunakan untuk *checklist disclosure* adalah versi G4 karena data yang dianalisis adalah data pelaporan mulai tahun 2014, sebelum Standar GRI dirilis. Dengan digunakannya versi G4 sebagai checklist pengungkapan, diharapkan analisis pengungkapan dapat dilakukan secara konsisten dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Selain itu, Standar GRI baru diberlakukan secara formal pada pertengahan tahun 2018 sehingga penggunaan Standar GRI tidak begitu relevan dengan data yang dianalisis dalam skripsi ini.

3.4.2 Pengukuran Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini, antara lain:

3.4.2.1 Praktik *Good Corporate Governance*

Variabel Praktik *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini dikur dengan indeks penilaian yang dikembangkan oleh Kent dan Zunker (2013) dan

disesuaikan dengan model corporate governance di Indonesia yang memiliki sistem 2 tier (komisaris dan direksi) seperti pengukuran yang digunakan oleh Abdurrahman (2017). Indeks penilaian ini disebut dengan *Corporate Governance Score (CGS)* yang terdiri dari 9 karakteristik. Prosedur untuk mengukur praktik *corporate governance* pada perusahaan dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Membuat tabel berisi 9 karakteristik *good corporate governance*. Tabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 *Corporate Governance Score (CGS)*

No	Karakteristik GCG	Kode	Ketentuan
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris	A	> 5
2	Komisaris Independen	B	> 50%
3	Terdapat anggota Komisaris yang merangkap sebagai Direksi	C	Tidak
4	Jumlahnya rapat Dewan Komisaris dalam setahun (periode laporan tahunan)	D	> 10
5	Identitas dan reputasi auditor eksternal	E	Termasuk dalam "Big 4"
6	Memiliki Komite <i>Social Responsibility</i>	F	Iya
7	Memiliki Komite Audit	G	Iya
8	Memiliki Komite <i>Remuneration</i>	H	Iya
9	Memiliki Komite <i>Nomination</i>	I	Iya

2. Mengidentifikasi praktik yang berkaitan dengan karakteristik *good corporate governance*.
3. Memberikan penilaian dengan metode berikut ini:
 - Nilai 1 = perusahaan memenuhi ketentuan dari karakteristik.
 - Nilai 0 = perusahaan tidak memenuhi ketentuan atau tidak mengungkapkan di dalam laporan tahunan perusahaan
4. Menghitung tingkat praktik corporate governance dengan rumus:

$$\text{Praktik GCG} = \frac{\text{Jumlah nilai karakteristik GCG yang dipenuhi}}{\text{Jumlah nilai maksimum karakteristik GCG}}$$

Adapun ketika auditor eksternal dari perusahaan BUMN merupakan rekanan ataupun member dari auditor bigfour, Peneliti akan tetap menganggap bahwa perusahaan tersebut di audit oleh auditor bigfour.

3.4.2.2 Tingkat Kepemilikan Pemerintah

Pengukuran untuk variabel tingkat kepemilikan pemerintah dalam penelitian ini menggunakan pengukuran seperti yang terdapat dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Tabel Pengukuran Tingkat Kepemilikan Pemerintah

Peneliti	Negara	Pengukuran
Amran dan Haniffa (2011)	Malaysia	Persentase kepemilikan pemerintah
Muttakin dan Subramaniam, (2015)	India	Persentase kepemilikan pemerintah
Ismiyanti dan Hamidya (2017)	Indonesia	Persentase kepemilikan pemerintah
Budiarti dan Sulistyowati (2016)	Indonesia	Persentase kepemilikan pemerintah

3.4.2.3 Kekuatan Dewan Direksi

Variabel kekuatan dewan direksi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kategorisasi *dummy*, 1 = bila ada proporsi saham yg dimiliki oleh anggota dewan direksi, 0 = bila tidak ada proporsi saham yang dimiliki oleh anggota dewan direksi. Di dalam literatur, beberapa peneliti menggunakan jumlah saham yang dimiliki oleh dewan direksi dalam perusahaan untuk mengukur variabel ini. Misalnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (La, 2019). Akan tetapi, karena tidak semua perusahaan BUMN di Indonesia memiliki proporsi

saham yang dimiliki oleh anggota dewan direksi, skripsi ini memutuskan untuk menggunakan ukuran *dummy*, bukan jumlah saham.

3.4.3 Pengukuran Variabel Kontrol

Penelitian ini selain menggunakan variabel dependen dan independen juga menggunakan variabel kontrol. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe industri, kinerja keuangan dan ukuran perusahaan. Pengukuran untuk variabel kontrol dalam penelitian ini menggunakan pengukuran seperti yang terdapat dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Teknik Pengukuran Variabel Kontrol

Variabel Kontrol	Pengukuran	Tipe Data
Tipe Industri	Variabel Dummy: 1 = Industri Risiko Korupsi Tinggi 0 = Industri Risiko Korupsi Rendah	Kategorikal
Kinerja Keuangan	ROA – rata-rata dalam 2 tahun terakhir	Continuous
Ukuran Perusahaan	Total Asset	Continuous

3.4.3.1 Tipe Industri

Tipe industri adalah salah satu variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini. Pengukuran tipe industri pada penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Pengukuran Tipe Industri Penelitian Terdahulu

Penulis	Negara	Pengukuran
Cahaya et al., (2012)	Indonesia	Risiko Tinggi: 1. Pertanian 2. Pertambangan

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Industri dasar dan kimia 4. Aneka Industri 5. Industri barang-barang konsumen 6. Properti dan real estate 7. Infrastruktur, keperluan dan transportasi <p>Risiko Rendah:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Keuangan 2. Perdagangan, jasa dan investasi
Amran dan Haniffa (2011)	Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Aneka Industri 2. Industri barang-barang konsumen 3. Konstruksi 4. Trading dan teknologi 5. Keuangan 6. Pertambangan
Amran dan Devi (2008)	Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Aneka Industri 2. Industri barang-barang konsumen 3. Konstruksi 4. Trading dan teknologi 5. Keuangan 6. Pertambangan

Penelitian ini mencoba mengukur pelaporan anti korupsi beberapa negara di Asean. Penelitian ini mengembangkan tolak ukur baru untuk menentukan industri tingkat tinggi dan rendah dengan menggunakan *Transparency International Bribe Payer Index*. Industri yang memiliki risiko korupsi tinggi diberikan skor 1 dan industri yang memiliki risiko rendah diberikan skor 0.

Perbedaan diantara industri yang memiliki risiko korupsi tinggi dan rendah didasarkan pada *Bribe Payer Index* yang diterbitkan oleh *Transparency International* tahun 2011. Indeks ini dihasilkan berdasarkan jawaban survei pembayar suap yang mempertanyakan keterlibatan perusahaan dalam penyuaipan di

pejabat publik tingkat rendah, penggunaan kontribusi yang tidak patut kepada politisi tingkat tinggi, dan juga kemungkinan menerima suap dari perusahaan swasta lain (Transparency International, 2011). Hasil dan kelompok masing-masing sektor bisnis disajikan dengan jelas dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Tabel Risiko Industri

Peringkat	Sektor	Skor	Kategori Risiko
1.	Pertanian	7,1	Tinggi
2.	Manufaktur ringan	7,1	Tinggi
3.	Dirgantara sipil	7,0	Tinggi
4.	Teknologi Informasi	7,0	Tinggi
5.	Bank dan Keuangan	6,9	Tinggi
6.	Kehutanan	6,9	Tinggi
7.	Jasa Konsumen	6,8	Tinggi
8.	Telekomunikasi	6,7	Tinggi
9.	Transporatsi dan penyimpanan	6,7	Tinggi
10.	Senjata, pertahanan dan militer	6,6	Tinggi
11.	Perikanan	6,6	Tinggi
12.	Manufaktur berat	6,5	Rendah
13.	Farmasi dan layanan kesehatan	6,4	Rendah
14.	Pembangkit listrik	6,4	Rendah
15.	Pertambangan	6,4	Rendah
16.	Oli dan gas	6,2	Rendah
17.	Real estate, properti, layanan hukum dan bisnis	6,1	Rendah
18.	Keperluan	6,1	Rendah
19.	Kontrak pekerjaan umum dan konstruksi	5,3	Rendah
	Rata-rata	6,6	

Sumber: *Transparency International* (2011)

Industri yang mendapatkan skor sama dan di atas skor rata-rata global Bribe Payer Index (BPI) 6,6 dikategorikan sebagai industri risiko korupsi tinggi dan

industri risiko korupsi rendah dikategorikan jika mendapatkan skor dibawah rata-rata skor BPI.

3.4.3.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan yang digunakan pada penelitian ini di proksikan menggunakan ROA-two years average. Tabel 3.7 menyajikan pengukuran kinerja keuangan pada penelitian terdahulu.

Tabel 3. 7: Pengukuran kinerja keuangan penelitian terdahulu

Peneliti	Negara	Pengukuran
Cahaya et al., (2012)	Indonesia	ROA-2 years average
Hanifa dan Cahaya, (2016)	Indonesia	ROA-2 years average
Yudiartini dan Dharmadiaksa (2016)	Indonesia	ROA

Dari penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa pada umumnya pengukuran kinerja keuangan dilakukan menggunakan ROA-Two years average. Oleh karena itu pengukuran kinerja keuangan pada penelitian ini di proksikan menggunakan ROA-Two years average. ROA-Two years average dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Return\ on\ Asset\ (ROA) = \frac{\text{labar\ bersih\ setelah\ pajak}}{\left(\frac{\text{total\ aset\ tahun } (n) + \text{total\ aset\ tahun } (n-1)}{2} \right)}$$

3.4.3.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yang digunakan pada penelitian ini di proksikan dengan total aset. Tabel 3.8 menyajikan pengukuran variabel kontrol ukuran perusahaan pada penelitian ini terdahulu.

Tabel 3.8 Pengukuran Ukuran Perusahaan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Negara	Pengukuran
Cahaya, Porter, dan Brown (2008)	Indonesia	Total aset
Hanifa dan Cahaya, (2016)	Indonesia	Log of Total aset
Bestivano (2013)	Indonesia	Total aset

Dari penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa pada umumnya pengukuran ukuran perusahaan dilakukan menggunakan Total Aset. Oleh karena itu pengukuran ukuran perusahaan pada penelitian ini menggunakan Total Aset.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Melalui statistik deskriptif, deskripsi data (mean dan berbagai distribusi) setiap variabel (pelaporan anti korupsi, praktik *good corporate governance*, tingkat kepemilikan pemerintah dan kekuatan dewan direksi) dapat diidentifikasi sebagai gambaran data sampel dalam kaitannya pelaporan anti korupsi dapat diidentifikasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terbebas dari gangguan normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Adapun bagian dari uji dari asumsi klasik akan dijelaskan sebagai berikut.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan pada taraf signifikan hasil hitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- Probabilitas $>0,05$: hipotesis diterima karena data terdistribusi secara normal
- Probabilitas $<0,05$: hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi secara normal

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dalam penelitian (Ghozali, 2011). Metode VIF digunakan untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas. Apabila $VIF < 10$ dan $\text{tolerance value} > 0,10$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. Sebaliknya jika $VIF > 10$ dan $\text{tolerance value} < 0,10$ maka terjadi multikolinearitas yang tinggi diantara variabel bebas.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain adalah tetap, maka disebut homoskedastisitas dan apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain adalah berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang menunjukkan homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Glejser yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas. Untuk mengetahui tidak adanya heteroskedastisitas

ditunjukkan dengan tidak adanya variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Residual (AbRes). Hal tersebut dapat diketahui ketika probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5 persen.

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Hipotesis penelitian ini akan diuji menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression*). Analisis regresi linier berganda merupakan metode statistik yang umum digunakan dalam meneliti hubungan antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah apakah variabel-variabel praktik *good corporate governance*, tingkat kepemilikan pemerintah, kekuatan dewan direksi berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi.

$$PAK = \beta_0 + \beta_1 GCG + \beta_2 KP + \beta_3 KDK + \beta_4 TI + \beta_5 KK + \beta_6 UK + e \quad (1)$$

Keterangan:

- PAK = Pelaporan Anti Korupsi
- GCG = Praktik Good Corporate Governance
- KP = Tingkat Kepemilikan Pemerintah
- KDK = Kekuatan Dewan Direksi
- TI = Tipe Industri
- KK = Kinerja Keuangan
- UK = Ukuran Perusahaan
- e = Error
- $\beta_0 \beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi variabel independen
- $\beta_4 \beta_5 \beta_6$ = Koefisien regresi variabel kontrol

3.5.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Stastisyik F)

Uji kelayakan model (uji F) dimaksudkan dalam rangka mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Berikut ini merupakan ketentuan dalam Uji F:

- a) Apabila tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan, yaitu sebesar 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.
- b) Apabila tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan, yaitu sebesar 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependennya. Dalam penelitian ini koefisien determinasi dilihat melalui *adjusted R square* (Ghozali, 2011). Nilai R^2 adalah antara nol (0) sampai dengan satu (1). Nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Sedangkan nilai (R^2) yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi dan menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 2011).

3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji T dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri dengan variabel dependennya. Berikut ini ketentuan dari uji T:

- Apabila tingkat signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dalam hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5% (0,05), maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Apabila tingkat signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dalam hasil pengolahan nilainya lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5% (0,05), maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab empat dalam penelitian ini menyajikan hasil dan pembahasan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik dari 80 laporan tahunan perusahaan BUMN pada tahun 2014 sampai 2017. Laporan tahunan perusahaan BUMN dikumpulkan dari sampel perusahaan yang terdaftar di BEI dan tidak mengalami merger selama tahun 2014 sampai 2017 serta *sustainability report* bagi perusahaan yang menerbitkan. Analisis dan pembahasan berfokus kepada hubungan dan karakteristik antara variabel independen (praktik *good corporate governance*, kekuatan dewan direksi, dan kepemilikan pemerintah), variabel kontrol (kinerja keuangan, tipe industri, dan ukuran perusahaan) dan variabel dependen (pelaporan anti korupsi).

Pembahasan mengenai statistik deskriptif dan uji asumsi klasik dari pelaporan anti korupsi digunakan guna menjawab pertanyaan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian, yaitu variabel dependen (pelaporan anti korupsi), variabel independen (praktik *good corporate governance*,

tingkat kepemilikan pemerintah dan kekuatan dewan direksi) dan variabel kontrol (tipe industri, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan).

Data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan atau verifikasi data oleh pihak independen dengan mengambil sampel 2 perusahaan (10%)³ dari total 20 perusahaan. Tingkat validitas data setelah dilakukan verifikasi berada pada angka 94,38%. Terkait proses verifikasi data penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 14. Statistik Deskriptif Variabel Independen

Variabel independen didalam penelitian ini di deskripsikan secara *continuous* dan kategorikal. Tabel 4.1 akan menunjukkan hasil statistik deskriptif variabel independen secara *continuous*.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Independen Diukur Secara *Continuous*

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Praktik GCG	55,56%	88,89%	73,75%	98,82%
Kepemilikan pemerintah	51,00%	90,00%	64,14%	10,57%

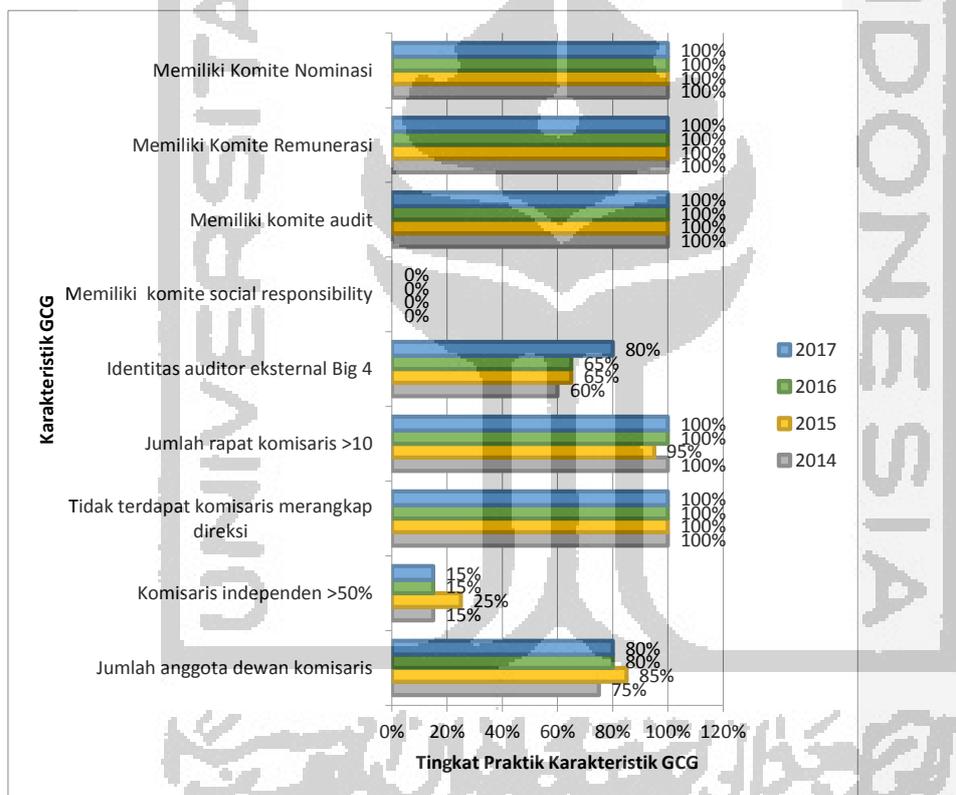
Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa variabel praktik GCG yang diprosikan dengan Indeks *Corporate Governance Score* (CGS) menunjukkan bahwa untuk perusahaan sampel memiliki nilai minimum sebesar 55,56%, sedangkan perusahaan sampel memiliki nilai maksimum

³Penentuan angka 10% menunjuk pada penelitian yang dilakukan oleh Cahaya (2009). Sebetulnya, penentuan terlihat tidak memiliki latar belakang teoritis. Akan tetapi, penentuan angka ini lebih bertujuan untuk verifikasi data sehingga kemungkinan kesalahan pengambilan data dapat diminimalkan.

sebesar 88,89%. Nilai rata-rata praktik GCG dari perusahaan yang diteliti adalah 73,75%.

Praktik GCG terdiri atas 9 karakteristik yang harus diungkapkan serta dipenuhi oleh perusahaan. Adapun mengenai tingkat praktik karakteristik GCG dari tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Grafik Tingkat Praktik *Good Corporate Governance* Tahun 2014-2017

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa kriteria yang paling banyak diungkapkan dan dipenuhi adalah kriteria tidak terdapat anggota Komisaris yang merangkap sebagai Direksi, jumlah rapat komisaris >10 dalam satu tahun, memiliki komite nominasi, memiliki komite audit, dan memiliki komite remunerasi; artinya seluruh perusahaan dalam sampel mengungkapkan dan memenuhi lima kriteria tersebut. Disisi lain, kriteria yang paling sedikit diungkapkan dan dipenuhi adalah kriteria jumlah komisaris independen $>50\%$ dan memiliki komite *social responsibility*.

Kurangnya perusahaan dalam memenuhi kriteria jumlah komisaris independen $>50\%$ salah satunya disebabkan karena peraturan BEI yang hanya mewajibkan perusahaan memiliki komisaris independen minimal 30% dari jumlah anggota komisaris. Sehingga berdasarkan laporan tahunan yang telah identifikasi, Penulis menemukan bahwa rata-rata tingkat jumlah komisaris independen hanya sebesar yang diwajibkan BEI saja.

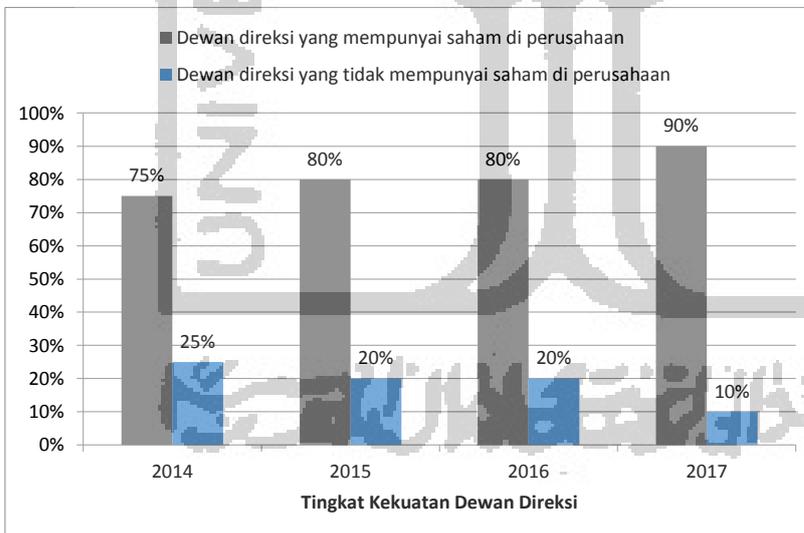
Variabel kepemilikan pemerintah memiliki nilai paling rendah sebesar 51% (PT Pembangunan Perumahan Tbk). Sedangkan kepemilikan pemerintah pada perusahaan sampel yang memiliki nilai paling tinggi adalah sebesar 90,03% (PT Kimia Farma Tbk). Rata-rata kepemilikan pemerintah dari perusahaan yang telah diteliti adalah sebesar 64,19%.

Tabel 4.2 akan menunjukkan hasil statistik deskriptif variabel independen kekuatan dewan direksi secara kategorikal.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Independen Diukur Secara Kategorikal

Variabel	Pengukuran	Tahun	Persentase dalam tiap kategori
Kekuatan Direksi Dewan	1= terdapat saham direksi di perusahaan 0=tidak terdapat saham direksi di perusahaan	2014	1 = 75% 0 = 25%
		2015	1 = 80% 0 = 20%
		2016	1 = 80% 0 = 20%
		2017	1 = 90% 0 = 10%

Variabel kekuatan dewan direksi memiliki nilai rata-rata sebesar 0,8125. Adapun mengenai tingkat kekuatan dewan direksi yang diprosikan dengan dewan direksi yang mempunyai saham didalam perusahaan dari tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2: Grafik Tingkat Kekuatan Dewan Direksi Tahun 2014-2017

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas dewan direksi mempunyai saham didalam perusahaan. Tahun 2014 ada sebanyak 75% dewan direksi yang mempunyai saham di perusahaan, tahun 2015 sebanyak 80%, tahun 2016 sebanyak 80%, dan tahun 2017 sebanyak 90%.

4.2.1.1 Statistik Deskriptif Variabel Kontrol

Variabel kontrol didalam penelitian ini di deskripsikan secara *continuous* dan kategorikal. Tabel 4.3 menunjukkan hasil dari statistik deskriptif variabel kontrol secara *continuous*.

Tabel 4.3: Statistik Deskriptif Variabel Kontrol Secara *Continuous*

	Minimum	Maximum	Mean	Std Dev
Ukuran Perusahaan (dalam jutaan rupiah)	921.548	11.126.248.442	291.113.200	1.257.964.200
Kinerja keuangan- (ROA years average)	-12,33%	20,72%	4,17%	6,08%

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Tabel 4.3 merupakan statistik deskriptif variabel kontrol yang di deskripsikan secara *continuous*. Data pada variabel kinerja keuangan menunjukkan bahwa perusahaan sampel dengan kinerja keuangan paling rendah mempunyai ROA sebesar -12,33% (PT Garuda Indonesia Tbk), kinerja keuangan PT Garuda Indonesia berada dititik minus dikarenakan laba bersih perusahaan yang merugi atas biaya rental banyaknya pesawat yang baru datang, membuat kapasitas kursi meningkat, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan penjualan, sedangkan kinerja keuangan yang paling tinggi mempunyai nilai ROA sebesar 20,72% (PT Bukit Asam Tbk), kinerja keuangan PT Bukit Asam berada dititik paling tinggi

dikarenakan pertumbuhan volume penjualan batu bara. Rata-rata kinerja keuangan mempunyai nilai ROA sebesar 6,087%.

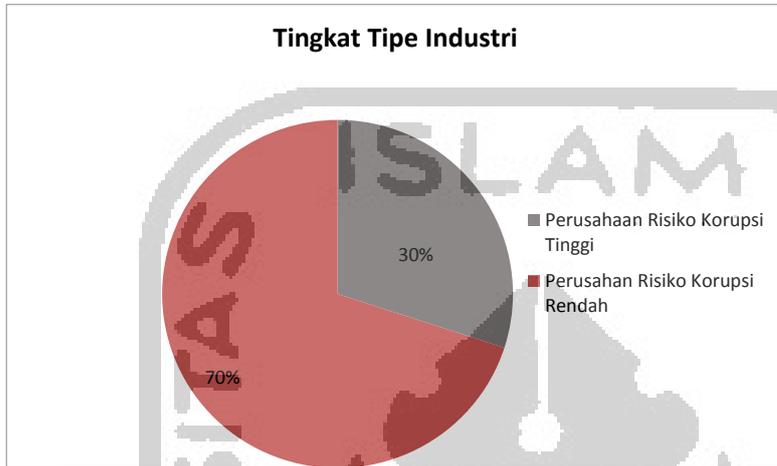
Ukuran perusahaan memiliki nilai paling rendah sebesar Rp. 921.548 Juta (921.548.277.156) yaitu PT Indo Farma Tbk, sedangkan nilai paling tinggi sebesar Rp. 11.126.248.442 Juta (11.126.248.442.000.000) yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Tabel 4.4 menunjukkan hasil dari statistik deskriptif variabel kontrol tipe industri secara kategorikal.

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Kontrol Secara Kategorikal

Variabel	Pengukuran	Persentase
Tipe industri	1 = perusahaan risiko korupsi yang tinggi	30%
	0 = perusahaan risiko korupsi yang rendah	70%

Variabel tipe industri memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3. Adapun mengenai tingkat tipe industri yang diprosikan dengan risiko perusahaan terhadap korupsi dari perusahaan sampel tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Gambar 4.3



Gambar 4.3 Grafik Tipe Industri Tahun 2014-2017

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa tipe industri pada perusahaan sampel memiliki risiko korupsi yang tinggi sebesar 30% dan sebesar 70% memiliki risiko korupsi yang rendah. Dikarenakan tipe industri perusahaan sampel pada tahun pengamatan tetap sama, maka Peneliti hanya menyajikan grafik tipe industri selama satu tahun saja.

4.2.1.2 Statistik Deskriptif Variabel Dependen

Variabel dependen didalam penelitian ini di deskripsikan secara *continuous*.

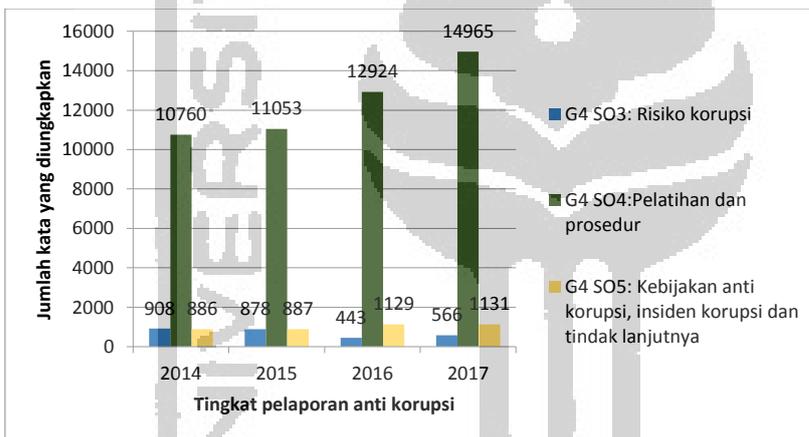
Tabel 4.5 menunjukkan hasil dari statistik deskriptif variabel dependen secara *continuous*.

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel Dependen Secara *Continuous*

	Minimum	Maximum	Mean	Std Dev
Pelaporan Anti Korupsi (dalam kata)	28	1876	706	365,96

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Tabel 4.5 merupakan statistik dekriptif variabel dependen pelaporan anti korupsi dari 20 sampel perusahaan yang dideskripsikan secara *continuous*. Data pada variabel pelaporan anti korupsi menunjukkan bahwa perusahaan sampel dengan pelaporan anti korupsi paling rendah sebesar 28 kata pengungkapan anti korupsi, sedangkan nilai pelaporan anti korupsi paling tinggi sebesar 1876 kata. Rata-rata pelaporan anti korupsi yang dilakukan oleh perusahaan sampel dalam penelitian ini sebesar 706 kata pengungkapan anti korupsi .



Gambar 4.4 Grafik Tingkat Pelaporan Anti Korupsi Pada Tahun 2014-2017

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2014, perusahaan sampel mengungkapkan G4 SO3 sebanyak 908 kata, G4 SO4 sebanyak 10.760 kata, dan G4 SO5 sebanyak 886 kata. Tahun 2015 mengungkapkan G4 SO3 sebesar 878 kata, G4 SO4 sebesar 11.053 kata, dan G4 SO5 sebesar 887 kata. Tahun 2016 mengungkapkan G4 SO3 sebesar 443 kata, G4 SO4 sebesar 12.924 kata, dan G4 SO5 sebesar 1129 kata. Tahun 2017 mengungkapkan G4 SO3 sebesar 566 kata, G4

SO4 sebesar 14.965 kata, dan G4 SO5 sebesar 1.131 kata. Isi dari G4 SO3 adalah mengenai prosentase dan total operasi yang dinilai memiliki risiko terhadap korupsi dan identifikasi risiko secara signifikan, isi dari G4 SO4 memberikan informasi mengenai komunikasi dan pelatihan terhadap prosedur dan kebijakan anti korupsi, termasuk undang-undang pengungkapan anti korupsi dan *whistle-blowing practices*, sedangkan G4 SO5 adalah mengenai peristiwa korupsi dan penangannya.

Alasan yang mungkin bisa diberikan mengapa perusahaan lebih suka mengungkapkan G4 SO4 dibandingkan G4 SO3 dan G4 SO5 karena selain bisa menjadi pedoman untuk melakukan sistem pengendalian internal yang kuat, G4 SO4 juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan di mata stakeholder karena perusahaan dianggap memperhatikan masalah pengendalian anti korupsi.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linear terpenuhi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas data secara statistik, uji heteroskedasitas, dan multikolinearitas.

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Dasar dari pengambilan keputusan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah karena data yang normal. Data yang normal

ditunjukkan dengan nilai yang signifikan di atas 0,05. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters	Mean	0,000000
	Std. Dev	0,647587
Most Extreme Differences	Absolute	0,137
	Positive	0,082
	Negative	-0,137
Kolmogorov-smirnov Z		1,227
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,098

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Hasil uji normalitas pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-smirnov sebesar 1,227 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,098. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal, karena nilai p lebih dari 0,05.

4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam penelitian yang ditemukan dalam regresi. Tabel 4.7 merupakan hasil dari uji multikolinieritas.

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Praktik GCG	0,427	2,343
Kepemilikan Pemerintah	0,855	1,170
Kekuatan Dewan Direksi	0,693	1,443
Tipe Industri(variabel kontrol)	0,438	2,281
Ukuran Perusahaan (variabel kontrol)	0,268	3,729

Kinerja keuangan (variabel kontrol)	0,984	1,017
-------------------------------------	-------	-------

Variabel dependen: Pelaporan anti korupsi

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai tolerance semua variabel diatas 0,10 dan nilai VIF dari semua variabel lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung masalah multikolinieritas.

4.3.3 Hasil Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji glejser. Uji glejser digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedasitas dalam penelian. Tabel 4.8 merupakan hasil dari pengujian heteroskedasitas.

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedasitas

Variabel	Sig.
Praktik GCG	0,388
Kepemilikan Pemerintah	0,073
Kekuatan Dewan Direksi	0,169
Tipe Industri (variabel kontrol)	0,909
Ukuran Perusahaan (variabel kontrol)	0,645
Kinerja keuangan (variabel kontrol)	0,462

Variabel dependen: abs residual pelaporan anti korupsi

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Pengujian heteroskedasitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. Uji glejser digunakan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2011). Hasil uji heteroskedasitas pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari praktik gcg sebesar 0,388, kepemilikan pemerintah 0,073, kekuatan dewan direksi 0,169, tipe industri 0,909, ukuran

perusahaan 0,645, dan kinerja keuangan 0,462. Semua hasil tingkat signifikansi dari seluruh variabel tersebut diatas 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedasitas

4.4 Hasil Regresi Berganda

Tabel 4.9 merupakan hasil uji T dari uji regresi berganda, ujian koefisien determinasi (uji Adjusted R Square) dan uji signifikansi simultan (uji F).

Tabel 4.9 Hasil Regresi Berganda

Variabel	Prediksi Awal	Koefisien	p-value
Constant		7,199	0,000
Praktik GCG	+	1,671	0,039
Kepemilikan Pemerintah	+	1,310	0,013
Kekuatan Dewan direksi	+	0,340	0,253
Tipe Industri	+	-0,114	0,720
Ukuran Perusahaan	+	0,018	0,822
Kinerja Keuangan	+	1,289	0,311
Ringkasan model			
Standard error of estimate		0,529	
Adjusted R square		0,144	
Model Regresi		0,007	

Catatan: level signifikansi 5%

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa variabel praktik *good corporate governance* mempunyai nilai *p-value* sebesar 0,039. Oleh karena itu variabel praktik *good corporate governance* mempengaruhi pelaporan anti korupsi karena nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian maka hipotesisi pertama (H1) diterima.

Variabel independen kepemilikan pemerintah memiliki nilai *p-value* sebesar 0,013. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel

independen kepemilikan pemerintah dibawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah mempengaruhi pelaporan anti korupsi. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.

Variabel independen kekuatan dewan direksi memiliki nilai p-value 0,253. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel independen kekuatan dewan direksi diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan dewan direksi tidak mempengaruhi pelaporan anti korupsi. Dengan demikian hipotesis (H3) ditolak.

Tabel di atas menunjukkan hasil uji F statistik dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007. Oleh karena signifikansi dibawah 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel praktik *good corporate governance*, kepemilikan pemerintah, dan kekuatan dewan direksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi.

Hasil uji R² pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,144 atau 14,4%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hanya sebesar 14,4% variabel pelaporan anti korupsi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen praktik *good corporate governance*, kepemilikan pemerintah, dan kekuatan dewan direksi. Sisanya sebesar 85,6% dijelaskan oleh variabel lain.

4.5 Interpretasi Hasil

Hasil dari pengujian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat dua variabel independen praktik *good corporate governance* dan kepemilikan pemerintah yang mempengaruhi variabel dependen pelaporan anti

korupsi, sedangkan variabel lainnya, yaitu kekuatan dewan direksi tidak mempengaruhi variabel dependen pelaporan anti korupsi.

Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	β	Nilai p-value	t	Hasil
H1: Praktik <i>Good Corporate Governance</i>	0,335	0,039	2,101	Diterima
H2: Tingkat Kepemilikan Pemerintah	0,286	0,013	2,541	Diterima
H3: Kekuatan Dewan Direksi	0,144	0,253	1,153	Ditolak

4.5.1 Praktik *Good Corporate Governance* (GCG)

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama, praktik *good corporate governance* mempengaruhi pelaporan anti korupsi. Sehingga ketika semakin baik praktik *good corporate governance* suatu perusahaan maka semakin besar tingkat pelaporan anti korupsi perusahaan. Dalam teori *coercive isomorphism* menjelaskan bahwa perusahaan akan mendapatkan tekanan dari stakeholder yang terefleksikan dalam indikator *corporate governance score* (CGS) hal tersebut akan membuat perusahaan melaporkan pengungkapan anti korupsi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Healy dan Serafeim (2016) bahwa praktik *good corporate governance* berkaitan dengan peningkatan peringkat anti korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2016) menunjukkan hubungan yang positif bahwa GCG mempengaruhi luasnya pengungkapan CSR. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Kementerian BUMN yang meminta agar semua kegiatan BUMN terus berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik (GCG) untuk menghindari praktik korupsi (Ramadhan, 2019).

Implikasi membuktikan bahwa praktik *good corporate governance* yang semakin baik mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat pelaporan anti korupsi pada suatu perusahaan karena praktik *good corporate governance* mencerminkan bahwa perusahaan berkomitmen tinggi terhadap praktik anti korupsi yang ada di perusahaan. Hal ini juga diharapkan bagi perusahaan untuk memperhatikan praktik *good corporate governance* yang dapat mempengaruhi adanya upaya pelaporan anti korupsi oleh pihak manajemen perusahaan.

4.5.2 Kepemilikan Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, variabel kepemilikan pemerintah secara statistik mempengaruhi pelaporan anti korupsi. Tingkat kepemilikan pemerintah yang tinggi mencerminkan potensi kekuatan pemerintah dalam menekan perusahaan untuk melakukan praktik tertentu, termasuk praktik pengungkapan anti korupsi. Dalam teori *coercive isomorphism*, kepemilikan pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan agar sesuai dengan kepentingan pemerintah untuk melaporkan pelaporan, termasuk pelaporan anti korupsi. Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator, apabila mempunyai proporsi saham didalam perusahaan, maka pemerintah akan mempunyai kekuatan untuk menekan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR. Maka semakin tinggi nilai dari kepemilikan saham pemerintah yang ada di perusahaan maka semakin besar kekuatan pemerintah dalam menekan BUMN untuk mengungkapkan informasi. Penelitian yang dilakukan Amran dan Devi (2008) dan Cahaya, Porter, Tower, dan Brown (2012) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah mampu meningkatkan pelaporan anti

korupsi perusahaan karena pemerintah mampu menekan perusahaan untuk mengungkapkan pelaporan anti korupsi. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Julia dan Erwin (2013) yang menyatakan bahwa tingkat kepemilikan pemerintah mempunyai hubungan yang positif terhadap pengungkapan CSR

Implikasi terhadap kepemilikan pemerintah berpengaruh dalam pelaporan anti korupsi yang dapat mengindikasikan bahwa tingkat kepemilikan pemerintah yang tinggi mencerminkan potensi kekuatan pemerintah dalam menekan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tertentu, termasuk untuk melaporkan pelaporan anti korupsi. Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator diharapkan mampu menekan perusahaan untuk mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR.

4.5.3 Kekuatan Dewan Direksi

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga, variabel kekuatan dewan direksi yang direfleksikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh dewan direksi secara statistik tidak mempengaruhi pelaporan anti korupsi. Teori *coercive isomorphism* gagal menjelaskan hubungan antara kekuatan dewan direksi dan pelaporan anti korupsi. Seharusnya, menurut teori *coercive isomorphism* semakin besar jumlah saham yang dimiliki oleh direksi maka dewan direksi akan merasakan dampak langsung dari setiap keputusan yang mereka ambil, hal ini menyebabkan tekanan terhadap direksi untuk mengungkapkan pelaporan anti korupsi. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan La (2019) yang hasil penelitiannya membuktikan bahwa kekuatan dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Tidak ditemukannya hubungan kekuatan

dewan direksi dengan pelaporan anti korupsi diduga karena proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi. Tingkat kepemilikan saham direksi dalam perusahaan di Indonesia masih sangat rendah. Hal tersebut membuat direksi tidak mempunyai kekuatan untuk menekan perusahaan agar melaporkan pelaporan anti korupsi. Selain itu menurut Peneliti, direksi lebih berfokus untuk meningkatkan laba perusahaan yang akan lebih menguntungkan bagi direksi dan pemilik perusahaan daripada mengungkapkan pelaporan anti korupsi. Tahun 2017 terdapat tiga BUMN yang terdaftar di BEI yang tidak mencetak laba perusahaan atau merugi, yaitu Garuda Indonesia, Krakatau Steel, dan Indo Farma. Hal ini diperkuat dengan banyaknya BUMN yang tidak menghasilkan laba, BUMN yang mencapai 142 perusahaan ini belum bisa diandalkan dalam menggenjot penerimaan negara (Saleh, 2019). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rani, (2015), Trisnawati (2014), dan Sanjaya, Taufik, dan Azhar (2013) yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham direksi tidak berpengaruh dengan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Implikasinya terlihat pada kekuatan dewan direksi, dimana di Indonesia masih sedikit dewan direksi yang mempunyai proporsi saham pada perusahaan. Tingkat kepemilikan saham direksi dalam perusahaan masih sangat rendah. Hal tersebut membuat direksi tidak mempunyai kekuatan untuk menekan perusahaan untuk melakukan pelaporan anti korupsi.

4.5.4 Variabel Kontrol

Tipe industri, kinerja keuangan dan ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, ketiga variabel

tersebut secara statistik tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pelaporan anti korupsi. Tipe industri yang direfleksikan dengan risiko korupsi tinggi dan rendah tidak terbukti adanya keterkaitan dengan pelaporan anti korupsi dalam penelitian ini. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tipe industri tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pelaporan anti korupsi. Jika dilihat di lampiran 6, dapat diketahui bahwa tipe industri yang direfleksikan dengan perusahaan dengan risiko korupsi yang rendah yaitu 0 (PT Aneka Tambang tahun 2014) mempunyai pengungkapan pelaporan anti korupsi sebesar 701 kata dalam perhitungan content analysis, sedangkan perusahaan dengan risiko korupsi yang tinggi yaitu 1 mempunyai pengungkapan pelaporan anti korupsi sebesar 632 (PT Bank Mandiri) dalam perhitungan content analysis.

Kinerja keuangan secara statistik tidak mempunyai hubungan dengan pelaporan anti korupsi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2017) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pelaporan anti korupsi. Jika dilihat di lampiran 11, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan yang direfleksikan dengan ROA-2 years average mempunyai nilai paling rendah yaitu sebesar -12,33% (PT Garuda Indonesia) mempunyai pengungkapan pelaporan anti korupsi sebesar 638 kata dalam perhitungan content analysis, sedangkan kinerja keuangan mempunyai nilai paling tinggi sebesar 20,72% (PT Bukit Asam) mempunyai pengungkapan pelaporan anti korupsi sebesar 816 kata dalam perhitungan content analysis. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja

keuangan tidak mempunyai pengaruh dengan pelaporan anti korupsi dalam penelitian ini.

Ukuran perusahaan secara statistik juga tidak mempunyai hubungan dengan pelaporan anti korupsi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pelaporan anti korupsi. Jika dilihat di lampiran 12, dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan paling rendah yaitu sebesar 921.548.277.156 (PT Indo Farma) mempunyai pengungkapan pelaporan anti korupsi sebesar 633 kata dalam perhitungan content analysis, sedangkan ukuran perusahaan paling tinggi sebesar 11.126.248.442.000.000 (PT Bank Rakyat Indonesia) mempunyai pengungkapan pelaporan anti korupsi sebesar 673 dalam perhitungan content analysis. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan tidak mempunyai pengaruh dengan pelaporan anti korupsi dalam penelitian ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai praktik pelaporan anti korupsi perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Dengan menggunakan teori *coercive isomorphism*, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel praktik *good corporate governance*, kepemilikan pemerintah, dan kekuatan dewan direksi terhadap pelaporan anti korupsi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Karakteristik spesifik perusahaan yang diperiksa adalah praktik GCG, kepemilikan pemerintah, dan kekuatan dewan direksi. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, tipe industri, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan.

Objek penelitian ini adalah 80 laporan tahunan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017 serta laporan sustainability report bagi perusahaan yang mengeluarkannya pada tahun tersebut. Pelaporan anti korupsi kemudian dianalisis menggunakan *checklist* yang ada dalam *guideline* Global Reporting Index (GRI) versi G4 pada komponen anti korupsi. *Content analysis* digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa tingkat pelaporan anti korupsi dan uji asumsi klasik untuk menguji hipotesis. Tabel 5.1 menunjukkan ringkasan dari hasil penelitian.

Tabel 5.1 Ringkasan Hasil Penelitian

Pertanyaan Penelitian	Jawaban
1) Apakah praktik <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap tingkat pelaporan anti korupsi perusahaan BUMN?	Ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara praktik <i>good corporate governance</i> dengan pelaporan anti korupsi.
2) Apakah tingkat kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pelaporan anti korupsi perusahaan BUMN?	Ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kepemilikan pemerintah dengan pelaporan anti korupsi.
3) Apakah kekuatan dewan direksi berpengaruh terhadap tingkat pelaporan anti korupsi perusahaan BUMN?	Tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kekuatan dewan direksi dengan pelaporan anti korupsi.

Dari hasil hipotesis tersebut dapat dikatakan bahwa teori *coercive isomorphism* secara parsial dapat menjelaskan hubungan variabel dependen pelaporan anti korupsi dengan variabel independen dan variabel kontrol dalam penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 20 sampel perusahaan yang diteliti, mayoritas perusahaan sampel mengungkapkan item pengungkapan anti korupsi GRI pada poin G4-SO4. Alasan yang mungkin bisa diberikan mengapa mayoritas perusahaan mengungkapkan item G4-SO4 dibanding G4-SO3 dan G4-SO5 adalah G4-SO4 bisa menjadi pedoman untuk melakukan sistem pengendalian internal yang kuat, G4-SO4 dianggap dapat memberikan nilai tambah perusahaan di mata stakeholder.

Hanya dua variabel independen, yaitu praktik *good corporate governance* (GCG) dan tingkat kepemilikan pemerintah yang menunjukkan adanya hubungan

dengan pelaporan anti korupsi, sedangkan variabel independen kekuatan dewan direksi dan variabel kontrol kinerja keuangan, tipe industri, dan ukuran perusahaan tidak mempunyai hubungan dengan pelaporan anti korupsi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian tersebut adalah:

1. Peneliti menggunakan GRI G4 untuk acuan dalam pengambilan data variabel dependen, bukan Standar GRI, versi terbaru acuan GRI, yang dirilis pada pertengahan tahun 2016. Hal ini disebabkan karena penerapan Standar GRI secara efektif baru diberlakukan pada pertengahan tahun 2018.
2. Sampel yang digunakan didalam penelitian ini hanya menggunakan BUMN yang terdaftar di BEI. Hal ini dikarenakan Peneliti ingin mengetahui pertanggung jawaban perusahaan tidak hanya terhadap Pemerintah tetapi juga kepada stakeholder lain, seperti pemegang saham.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan GRI yang terbaru yaitu Standar GRI dalam pengambilan data variabel dependen, agar bisa dijadikan pembanding dengan penelitian ini yang menggunakan GRI G4.
2. Sampel yang pada penelitian selanjutnya baiknya tidak hanya memakai BUMN yang terdaftar di BEI, tetapi semua BUMN yang ada, agar mendapat gambaran yang lengkap mengenai bagaimana pelaporann anti korupsi pada BUMN.

5.4 Implikasi

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *good corporate goveranance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan anti korupsi. Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan diharapkan dapat memperhatikan praktik *good corporate goveranance* yang dapat mempengaruhi adanya upaya pelaporan anti korupsi oleh pihak manajer perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan anti korupsi.

Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah diharapkan dapat menekan perusahaan untuk melaporkan pelaporan anti korupsi, baik melalui regulasi maupun melalui rapat umum pemegang saham dalam BUMN yang terdaftar di BEI.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, R. (2017). *Reaksi Investor terhadap Pengumuman Laba, Pengungkapan Islamic Social Reporting, dan Pengungkapan Good Corporate Governance*. Universitas Islam Indonesia.
- Amran, A., & Devi, S. S. (2008). The impact of government and foreign affiliate influence on corporate social reporting: The case of Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 23(4), 386–404. <https://doi.org/10.1108/02686900810864327>
- Amran, A., & Haniffa, R. (2011). Evidence in development of sustainability reporting: a case of a developing...: UMUC Library OneSearch: Business & Management. *Business Strategy and the Environment*, 20(3), 141–156. Retrieved from <http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.umuc.edu/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=91788b78-3487-4720-9cb5-8bc294ad7618%40sessionmgr4004&hid=4203>
- Arifin, Z. (2003). Pengaruh Corporate Governance terhadap Reaksi Harga dan Volume Perdagangan Pada Saat Pengumuman Earnings. *Jurnal Dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi*, 6. Retrieved from <http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=8830>
- Barkemeyer, R., Preuss, L., & Lee, L. (2015). Corporate reporting on corruption: An international comparison. *Accounting Forum*, 39(4), 349–365. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.10.001>
- Bernardi, R., & Threadgill, V. (2011). Women Directors and Corporate Social Responsibility. *EJBO: Electronic Journal of Business Ethics and Organizational Studies*, (October).
- Bestivano, W. (2013). "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Perataan Laba pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI". Universitas Negeri Padang.
- Blanc, R., Branco, M. C., & Patten, D. M. (2016). Market reactions to transparency international reports on corporate anti-corruption. *Accounting and the Public Interest*, 16(1), 84–99. <https://doi.org/10.2308/apin-51680>
- Blanc, R., Islam, M. A., Patten, D. M., & Branco, M. C. (2017). Corporate anti-corruption disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(8), 1746–1770. <https://doi.org/10.1108/aaaj-02-2015-1965>
- Budhiman, I. (2019). Pejabat BUMN Korupsi, Tata Kelola Jadi Sorotan.
- Budiarti, E., & Sulistyowati, C. (2016). *Struktur Kepemilikan Dan Struktur Dewan Perusahaan*. 7(3), 161–177. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v7i3.2709>

- Cahaya, F. R. (2009). Labour Practices and Decent Work Disclosures in Indonesia. *Phd Thesis*, (October).
- Cahaya, F. R., Porter, S. A., & Brown, A. M. (2008). *Centre for Environmental Accountability*. (June).
- Cahaya, F. R., Porter, S. A., Tower, G., & Brown, A. (2012). Indonesia's low concern for labor issues. *Social Responsibility Journal*, 8(1), 114–132. <https://doi.org/10.1108/17471111211196610>
- D'onza, G., Brotini, F., & Zarone, V. (2017). Disclosure on Measures to Prevent Corruption Risks: A Study of Italian Local Governments. *International Journal of Public Administration*, 40(7), 612–624. <https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1143000>
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). GRIMALDI Evolution of the Insects.pdf. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Freeman, R. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Gao, S. S., Heravi, S., & Xiao, J. Z. (2005). Determinants of corporate social and environmental reporting in Hong Kong: A research note. *Accounting Forum*, 29(2), 233–242. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2005.01.002>
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Reporting Initiative. (2013). Pedoman Pelaporan Keberlanjutan G4. *Global Reporting Initiative*. Retrieved from www.globalreporting.org
- Gunawan, J., & Joseph, C. (2017). The Institutionalization of Anti-Corruption Practices in Indonesian Companies. *Emerald Insight*, 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/17471110710835554>
- Guthrie, J., & Abeysekera, I. (2006). Content analysis of social, environmental reporting: what is new? *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 10(2), 114–126. <https://doi.org/10.1108/14013380610703120>
- Halter, M. V., de Arruda, M. C. C., & Halter, R. B. (2009). Transparency to reduce corruption?: Dropping hints for private organizations in Brazil. *Journal of Business Ethics*, 84(3 SUPPL.), 373–385. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0198-6>
- Hanifa, A., & Cahaya, F. R. (2016). Ethical communication on society issues: a story from Indonesia. *Journal of Global Responsibility*, 7(1), 39–55. <https://doi.org/10.1108/jgr-09-2015-0020>

- Healy, P. M., & Serafeim, G. (2016). An analysis of firms' self-reported anticorruption efforts. *Accounting Review*, 91(2), 489–511. <https://doi.org/10.2308/accr-51191>
- Hess, D. (2009). Catalyzing corporate commitment to combating corruption. *Journal of Business Ethics*, 88(SUPPL. 4), 781–790. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0322-7>
- Islam, M. A., Dissanayake, T., Dellaportas, S., & Haque, S. (2018). Anti-bribery disclosures: A response to networked governance. *Accounting Forum*, 42(1), 3–16. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2016.03.002>
- Islam, M. A., Haque, S., Dissanayake, T., Leung, P., & Handley, K. (2015). Corporate Disclosure in Relation to Combating Corporate Bribery: A Case Study of Two Chinese Telecommunications Companies. *Australian Accounting Review*, 25(3), 309–326. <https://doi.org/10.1111/auar.12064>
- Islam, M. A., Haque, S., & Gilchrist, D. (2017). NFPOs and their anti-corruption disclosure practices. *Public Money and Management*, 37(6), 443–450. <https://doi.org/10.1080/09540962.2017.1316133>
- Ismiyanti, F., & Hamidya, A. R. (2017). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Dengan Value Added Intellectual Capital Coefficient (VAIC) Sebagai Variabel Intervening [The Influence of Ownership Structure on Performance with Value Added Intellectual Capital Coefficient (VAIC) as an Inte. *DeReMa (Development Research of Management): Jurnal Manajemen*, 12(1), 40. <https://doi.org/10.19166/derema.v12i1.340>
- Issa, A., & Alleyne, A. (2018). Corporate disclosure on anti-corruption practice. *Journal of Financial Crime*, 25(4), 1077–1093. <https://doi.org/10.1108/jfc-05-2017-0045>
- Jayanti, K. R. (2016). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 59(1), 16–22.
- Joseph, C., Gunawan, J., Sawani, Y., Rahmat, M., Avelind Noyem, J., & Darus, F. (2016). A comparative study of anti-corruption practice disclosure among Malaysian and Indonesian Corporate Social Responsibility (CSR) best practice companies. *Journal of Cleaner Production*, 112, 2896–2906. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.091>
- Julia, & Erwin. (2013). Analisis Pengaruh Kepemilikan Saham terkonsentrasi, pemerintah dan asing, Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan. *JEM: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang*. Retrieved from <http://www.stiepertiba.ac.id/ojs/index.php/jem/article/view/10/8>

- Kent, P., & Zunker, T. (2013). Attaining legitimacy by employee information in annual reports. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(7), 1072–1106. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1261>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. , (2006).
- Kusuma, R. (2017). *Tingkat Pengungkapan Anti Korupsi Bagi Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- La, G. (2019). The Impact of External CEO Power on Corporate Social Responsibility. *Risk Management and Insurance Review*, 6(2), 97–121. <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2007.12.002>
- Muttakin, M. B., & Subramaniam, N. (2015). Firm ownership and board characteristics: Do they matter for corporate social responsibility disclosure of Indian Companies? *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6(2), 138–165. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-10-2013-0042>
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keunagan Berkelanjutan Bagi lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik*. , (2017).
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. , (2007).
- Rachman, D. (2019a). KPK Ingatkan BUMN. Retrieved July 2, 2019, from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/15/09380471/kpk-ingatkan-bumn>
- Rachman, D. (2019b). KPK Perpanjang Masa Penahan Eks Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II. Retrieved November 12, 2019, from kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/29/18530611/kpk-perpanjang-masa-penahanan-eks-direktur-keuangan-angkasa-pura-ii>
- Sanjaya, O., Taufik, T., & Azhar, A. (2013). *PENGARUH Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/33342-ID-pengaruh-good-corporate-governance-profitabilitas-dan-ukuran-perusahaan-terhadap.pdf>
- Sari, T. (2018). *The Influence of Coercive Pressure On Asean Companies Anti-Corruption Disclosure*. Universitas Islam Indonesia.
- Sari, W. N., & Rani, P. (2015). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilika Manajerial, Return On Asser (ROA) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)*. 4. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>

Transparency International. (n.d.). Building an effective anti-corruption programme. Retrieved November 22, 2019, from https://www.transparency.si/images/publikacije/effective_antic_programme.pdf

Transparency International. (2011). Bribe Payers Index 2011. Retrieved from Transparency International website: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/bpi_2011

Transparency International. (2018). Corruption Perceptions Index 2018. Retrieved from <https://www.transparency.org/cpi2018>

Trisnawati, R. (2014). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)*. Retrieved from <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4605>

Yudiartini, D., & Dharmadiaksa, I. (2016). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1183–1209.



LAMPIRAN 1

Panduan GRI Aspek Anti Korupsi

Global Reporting Initiative (GRI) Aspek Anti korupsi Tahun 2013

Sumber: Global Reporting Initiative (2013)

Aspek: Anti korupsi

1. G4-SO3

Jumlah dan Prosentase Operasi yang Dinilai Berkaitan dengan Risiko Korupsi dan Mengidentifikasi Risiko Korupsi

- a) Melaporkan mengenai jumlah dan prosentase operasi yang dinilai berkaitan dengan risiko korupsi
- b) Melaporkan mengenai risiko signifikansi korupsi yang diidentifikasi melalui penilaian risiko.

Panduan

Relevansi

Sistem dengan prosedur pendukung dibutuhkan untuk upaya mengelola risiko korupsi. Indikator ini mengukur sejauh mana organisasi menerapkan penilaian risiko korupsi. Potensi terjadinya korupsi di organisasi dibantu dinilai dengan penilaian risiko. Penilaian risiko juga untuk merancang kebijakan dan prosedur untuk memerangi korupsi yang nantinya akan membantu organisasi.

Penyusunan

Identifikasi risiko terkait dengan korupsi pada operasi yang dinilai. Hal ini difokuskan pada korupsi atau penyertaan korupsi sebagai faktor risiko pada asesmen risiko resmi

Definisi

a. Korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang diamanatkan demi keuntungan pribadi dan dapat dipicu oleh perorangan atau organisasi. Dalam pedoman, praktik seperti suap, pembayaran pelicinan, penipuan, pemerasan, kolusi, dan pencucian uang merupakan bentuk dari korupsi. Hal ini juga mencakup penawaran dan penerimaan hadiah, pinjaman komisi, upah, atau keuntungan lainnya untuk atau dari siapa pun sebagai bujukan agar melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau melanggar kepercayaan dalam menyelenggarakan bisnis perusahaan. Hal ini dapat mencakup imbalan tunai atau non tunai, seperti barang gratis, hadiah, dan paket liburan, atau layanan pribadi khusus yang diberikan untuk tujuan keunggulan yang tidak patut atau yang dapat mengakibatkan desakan moral untuk menerima keunggulan tersebut.

b. Lokasi Operasi

Lokasi yang digunakan untuk dilakukan aktivitas produksi, penyimpanan, dan atau distribusi barang dan jasanya, atau untuk tujuan administrative (seperti kantor) oleh perusahaan. Dalam satu lokasi operasi, mungkin

terdapat beberapa lini produksi, gudang, atau aktivitas lainnya. Misalnya, beberapa produk mungkin menggunakan satu pabrik atau beberapa aktivitas ritel yang berbeda mungkin menggunakan satu outlet atau ritel yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi.

Sumber Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup laporan pemantauan, pencatatan risiko atau sistem manajemen risiko

2. G4-SO4

Komunikasi dan Pelatihan Terhadap Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi

- a) Mengelompokkan menurut wilayah, laporan jumlah total dan persentase anggota badan tata kelola yang telah diinformasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi organisasi.
- b) Mengelompokkan menurut kategori karyawan dan wilayah, laporan jumlah total dan persentase karyawan yang menginformasikan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi organisasi.
- c) Mengelompokkan menurut jenis mitra bisnis dan wilayah, laporan jumlah total dan persentase mitra bisnis tentang yang menginformasikan kebijakan dan prosedur anti korupsi.
- d) Mengelompokkan menurut kategori karyawan dan wilayah, laporan jumlah pelatihan mengenai anti korupsi dari total dan persentase anggota badan tata kelola.

- e) Mengelompokkan menurut kategori karyawan dan wilayah, laporan jumlah total dan persentase pelatihan anti korupsi yang telah diterima oleh karyawan.

Panduan

Relevansi

Komunikasi dan pelatihan membangun kesadaran internal dan eksternal dan kapasitas yang diperlukan untuk memerangi korupsi. Proporsi anggota badan tata kelola, karyawan dan mitra bisnis organisasi secara wajar diasumsikan mengetahui kebijakan dan prosedur anti korupsi disingkat dalam indikator ini.

Penyusunan

Dengan menggunakan data dari G4-LA12, identifikasi:

- Badan tata kelola yang terdapat di organisasi, seperti dewan direksi, komite manajemen, atau lembaga serupa untuk organisasi non-korporat
- Jumlah total individu dan atau karyawan yang membentuk badan tata kelola tersebut.

Definisi

- a) Karyawan
Karyawan dari organisasi yang individu yang berdasar hukum atau praktik nasional diakui sebagai karyawan dari organisasi.
- b) Kategori karywan

Mengelompokkan karyawan berdasarkan tingkatan, seperti: manajemen senior, manajemen menengah dan fungsi, seperti: teknis, administrative, dan produksi. Informasi ini berasal dari organisasi yang memiliki sistem sumber daya manusia.

c) Korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam pedoman, korupsi mencakup praktik seperti suap, pembayaran pelican, pinipuan, pemerasan, kolusi, dan pencucian uang. Hal ini meliputi penawaran dan penerimaan hadiah, pinjaman, komisi, upah, atau keuntungan lainnya untuk atau dari siapapun sebagai bentuk bujukan untuk melaksanakan sesuatu yang tidak jujur, illegal atau akan melanggar kepercayaan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Hal ini meliputi imbalan tunai atau non tunai, seperti hadiah, paket liburan, atau layanan khusus yang diberikan untuk tujuan keunggulan yang tidak patut atau yang bisa menjadikan desakan moral untuk menerima keunggulan tersebut.

d) Mitra Bisnis

Mitra bisnis meliputi pemasok, agen, pelobi dan perantara lainnya, mitra usaha venturan dan konsorsium, pemerintah, dan pelanggan. Didalam pedoman, pemasok meliputi makelar, kontraktor, konsultan, distributor, penerima waralaba atau penerima lisensi, pekerja dari rumah, kontraktor independen, pabrikan, produsen utama, subkontraktor, dan pemborong.

Sumber Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup catatan pelatihan.

3. G4-S05

Insiden Korupsi yang Terbukti dan Tindakan yang Diambil

- a. Laporan jumlah total dan sifat korupsi yang terbukti.
- b. Laporan jumlah total insiden terbukti dimana karyawan dikenakan pemutusan hubungan kerja atau sanksi disiplin karena korupsi.
- c. Laporan jumlah total insiden yang terbukti saat kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperpanjang karena pelanggaran terkait korupsi.
- d. Laporan khusus atas kasus hukum public terkait korupsi yang diajukan terhadap organisasi atau karyawan selama periode pelaporan dan hasil dari kasus tersebut.

Panduan

Relevansi

Korupsi dapat menjadi risiko signifikan bagi reputasi dan bisnis organisasi.

Kemiskinan dalam perekonomian transisi, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan demokrasi, kesalahan mengalokasikan investasi, dan mengacu aturan hukum, hal ini menghubungkan secara luas dampak negatif.

Organisasi semakin diharapkan mampu memperlihatkan ketaatan mereka terhadap praktik integritas, tata kelola dan bisnis yang baik oleh pasar, norma internasional,

dan pemangku kepentingan. Indikator ini menunjukkan tindakan tertentu yang diambil untuk membatasi paparan terhadap risiko korupsi, untuk pemangku kepentingan, terdapat kepentingan baik terhadap terjadinya insiden maupun respon dari organisasi.

Penyusunan

Mengidentifikasi jumlah total insiden korupsi yang terbukti. Insiden korupsi yang telah dibuktikan mengacu pada setiap kasus korupsi individual yang diketahui telah dibuktikan dengan fakta-fakta identifikasi sifat dari insiden korupsi yang terjadi. Kasus hukum public terkait korupsi termasuk investigasi public yang sedang berjalan, penuntutan, atau kasus yang telah diselesaikan.

Definisi

a. Insiden Korupsi yang Terbukti

Insiden korupsi yang telah dibuktikan. Hal ini tidak termasuk insiden korupsi yang masih dalam penyelidikan tatkala periode pelaporan

b. Karyawan

Individu yang berdasarkan hukum atau praktik nasional, diakui sebagai karyawan dari organisasi.

c. Korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam pedoman, korupsi mencakup praktik seperti suap, pembayaran pelican,

penipuan, pemerasan, kolusi, dan pencucian uang. Hal ini meliputi penawaran dan penerimaan hadiah, pinjaman, komisi, upah, atau keuntungan lainnya untuk atau dari siapapun sebagai bentuk bujukan untuk melaksanakan sesuatu yang tidak jujur, illegal atau akan melanggar kepercayaan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Hal ini meliputi imbalan tunai atau non tunai, seperti hadiah, paket liburan, atau layanan khusus yang diberikan untuk tujuan keunggulan yang tidak patut atau yang bisa menjadikan desakan moral untuk menerima keunggulan tersebut.

d. Mitra Bisnis

Mitra bisnis meliputi pemasok, agen, pelobi dan perantara lainnya, mitra usaha venturan dan konsorsium, pemerintah, dan pelanggan. Didalam pedoman, pemasok meliputi makelar, kontraktor, konsultan, distributor, penerima waralaba atau penerima lisensi, pekerja dari rumah, kontraktor independen, pabrikan, produsen utama, subkontraktor, dan pemborong.

Sumber Dokumentasi

Sumber informasi potensial meliputi catatan kasus bagai legal yang diajukan terhadap organisasi, karyawan, atau mitra bisnis; berita acara dengar pendapat disipliner internal; dan kontrak dengan mitra bisnis.

LAMPIRAN 2

Penelitian Terdahulu untuk Menentukan Pelaporan Anti Korupsi

No	Nama Peneliti	Teori	Sumber Data	Sampel	Variabel	Hasil
1.	(Halter et al., 2009)	Tidak disebutkan	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara perwakilan perusahaan • Wawancara dengan suplier 	Perusahaan multinasional yang ada di Brazil dengan jumlah karyawan 40.000 diseluruh dunia.	<u>Dependen:</u> Korupsi <u>Independen:</u> Transparansi	Salah satu inisiatif mengurangi korupsi paling penting dapat dengan jelas diberikan oleh transparansi informasi dan komunikasi kode etik dalam organisasi.
2.	(Halter, de Arruda, & Halter, 2009)	Tidak disebutkan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keberlanjutan • Pelaporan anti korupsi 	Perusahaan sektor privat	Dependen: Korupsi Independen: Prinsip perusahaan	Sektor publik perlu mengeksplorasi cara-cara itu dapat mempengaruhi adopsi dan implementasi prinsip-prinsip perusahaan untuk benar-benar mengatalisasi komitmen perusahaan untuk memerangi korupsi.

3.	(Hess, 2009)	Teori Institutional	Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan	Tujuh sektor perusahaan (perbankan; konstruksi; listrik; logam industri; pertambangan; minyak & gas dan akhirnya gas, air & multi-utilitas) yang menerbitkan laporan tahunan dan keberlanjutan pada tahun 2006-2009.	<p>Dependen: Indikator GRI SO2, SO3, dan SO4</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekanan tingkat negara dan tingkat regional • Tekanan tingkat sektoral • Tekanan global 	Perusahaan-perusahaan Asia Selatan dan Timur ternyata memiliki tingkat cakupan indikator GRI yang tinggi tentang korupsi, sedangkan negara-negara Eropa Timur menunjukkan tingkat yang sangat rendah
4.	(Barkemeyer et al., 2015)	Tidak disebutkan.	laporan transparansi perusahaan dan anti korupsi	Perusahaan Amerika yang ada di Transparency International dan menerbitkan laporan transparansi perusahaan dan pelaporan anti korupsi.	<p>Dependen: Pengungkapan Anti-Korupsi</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paparan Media • Kebebasan per 	Reaksi pasar rata-rata terhadap rilis laporan TI pertama adalah negatif dan signifikan secara statistik.

5.	(Blanc et al., 2016)	Tidak disebutkan.	pengungkapan antikorupsi perusahaan berasal dari Transparency International (TI)	500 perusahaan terkemuka dari Forbes 'Maret 2007 Global 2000, termasuk 250 perusahaan terbesar yang terdaftar, 107 perusahaan dari sektor berisiko tinggi, dan 143 perusahaan dari 25 negara pengeksport global teratas.	<p>Dependen:</p> <p>Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Peringkat Anti korupsi perusahaan</p> <p>Independen:</p> <p><i>Corporate Governance</i></p>	<p>Perkiraan korupsi di negara asal positif menyiratkan bahwa perusahaan-perusahaan dari negara asal yang kurang korup memiliki peringkat lebih tinggi.</p> <p>Peningkatan persentase direktur independen berkaitan dengan peningkatan peringkat antikorupsi.</p>
6.	(Healy & Serafeim, 2016)	Tidak disebutkan.	<ul style="list-style-type: none"> Dow Jones Factiva database. 	Peringkat Transparency International tahun 2012 tentang pengungkapan anti korupsi oleh 105 perusahaan multinasional terbesar di dunia	<p>Dependen:</p> <p>Pengungkapan anti korupsi</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paparan media Kebebasan press 	<p>Paparan media secara positif terkait dengan perbedaan dalam pengungkapan anti-korupsi perusahaan sampel.</p> <p>Pengungkapan kurang luas di mana kebebasan pers negara asal lebih dibatasi dan berkurangnya kebebasan pers tampaknya mengurangi dampak paparan media terhadap pengungkapan tersebut.</p>

7.	(Blanc et al., 2017)	<i>Coercive isomorphism</i>	Forum group interview 10 perusahaan dengan praktik CSR terbaik	10 perusahaan dinominasikan dalam Indonesia CSR Award 2014	<p>Dependen: Praktik anti korupsi</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan berdasarkan industri • Perusahaan berdasarkan kepemilikan 	Praktik ACP di perusahaan praktik berbasis CSR di Indonesia berlaku untuk aktivitas bisnis umum dan tidak khusus untuk aktivitas CSR, seperti amal, sponsor, donasi, dan keterlibatan masyarakat.
8.	(Gunawan & Joseph, 2017)	Teori Legitimasi Teori <i>Media-agenda setting</i>	Laporan keberlanjutan Perusahaan di sektor telekomunikasi dari tahun 1995-2010	Perusahaan di sektor telekomunikasi dari tahun 1995-2010	<p>Dependen: Pengungkapan <i>anti-bribery</i></p> <p>Independen: Perhatian media terhadap perusahaan</p>	Pengungkapannya secara signifikan terkait dengan perhatian media.

9.	(Islam et al., 2018)	Teori Institusional	Laporan keberlanjutan 66 perusahaan Gulf Council Council (GCC) tahun 2014.	66 perusahaan Gulf Council Council (GCC) tahun 2014.	<p>Dependen: Praktik pengungkapan anti korupsi</p> <p>Independen: <i>Good Corporate Governance</i></p>	Peningkatan signifikan dalam pentingnya pelaporan anti-korupsi, mengurangi korupsi, secara global.
----	----------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN 3

DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL YANG MENERBITKAN SUSTAINABILITY REPORT

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	2014	2015	2016	2017
1	ADHI	PT Adhi Karya Tbk.	1	1	1	1
2	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk.	1	1	1	1
3	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.	1	1	1	1
4	BBNI	PT Bank Negara Indonesia Tbk.	1	1	1	1
5	BBTN	PT Bank Tabungan Negara Tbk.	1	1	1	1
6	BMRI	PT Bank Mandiri Tbk.	1	1	1	1
7	GIAA	PT Garuda Indonesia Tbk.	1	1	1	1
8	INAF	PT Indo Farma Tbk.	0	0	0	0
9	JSMR	PT Jasa Marga Tbk.	1	1	1	1
10	KAEF	PT Kimia Farma Tbk.	0	0	0	0
11	KRAS	PT Krakatau Steel Tbk.	0	0	0	0
12	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	1	1	1	1

13	PTPP	PT Pembangunan Perumahan Tbk.	0	1	0	1
14	PTBA	PT Bukit Asam Tbk.	1	1	1	0
15	SMBR	PT Semen Baturaja Tbk.	0	0	0	0
16	SMGR	PT Semen Indonesia Tbk.	1	1	1	1
17	TINS	PT Timah Tbk.	0	0	0	1
18	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	1	1	1	0
19	WIKA	PT Wijaya Karya Tbk.	1	1	1	1
20	WSKT	PT Waskita Karya Tbk.	0	0	0	1

Keterangan:

1 = Perusahaan yang menerbitkan sustainability report

0 = Perusahaan yang tidak menerbitkan sustainability report

LAMPIRAN 4
DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL

No	Kode Perusahaan	Perusahaan
1	ADHI	PT Adhi Karya Tbk.
2	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk.
3	BBNI	PT Bank Negara Indonesia Tbk.
4	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
5	BBTN	PT Bank Tabungan Negara Tbk.
6	BMRI	PT Bank Mandiri Tbk.
7	INAF	PT Indo farma Tbk.
8	JSMR	PT Jasa Marga Tbk.
9	KAEF	PT Kimia Farma Tbk.
10	KRAS	PT Krakatau Steel Tbk.
11	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
12	PTBA	PT Bukit Asam Tbk.
13	PTPP	PT Pembangunan Perumahan Tbk.
14	SMBR	PT Semen Baturaja Tbk.
15	TINS	PT Timah Tbk.
16	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
17	WIKA	PT Wijaya Karya Tbk.
18	WSKT	PT Waskita Karya Tbk.
19	GIAA	PT Garuda Indonesia Tbk.
20	SMGR	PT Semen Indonesia Tbk.

LAMPIRAN 5

TABEL CORPORATE GOVERNANCE SCORE

No	Karakteristik GCG	Kode	Ketentuan
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris	A	> 5
2	Komisaris Independen	B	> 50%
3	Terdapat anggota Komisaris yang merangkap sebagai Direksi	C	Tidak
4	Jumlahnya rapat Dewan Komisaris dalam setahun (periode laporan tahunan)	D	> 10
5	Identitas dan reputasi auditor eksternal	E	Termasuk dalam "Big 4"
6	Memiliki Komite <i>Social Responsibility</i>	F	Iya
7	Memiliki Komite Audit	G	Iya
8	Memiliki Komite <i>Remuneration</i>	H	Iya
9	Memiliki Komite <i>Nomination</i>	I	Iya

LAMPIRAN 6

Variabel Dependen

Pelaporan Anti Korupsi

		SO3	SO4	SO5	TOTAL
Adhi Karya	2014	0	28	0	28
	2015	0	28	0	28
	2016	0	973	32	1005
	2017	0	1095	31	1126
Aneka Tambang	2014	93	525	83	701
	2015	50	633	48	731
	2016	0	469	166	635
	2017	0	223	42	265
Bank BNI	2014	61	266	153	480
	2015	76	260	146	482
	2016	0	839	126	965

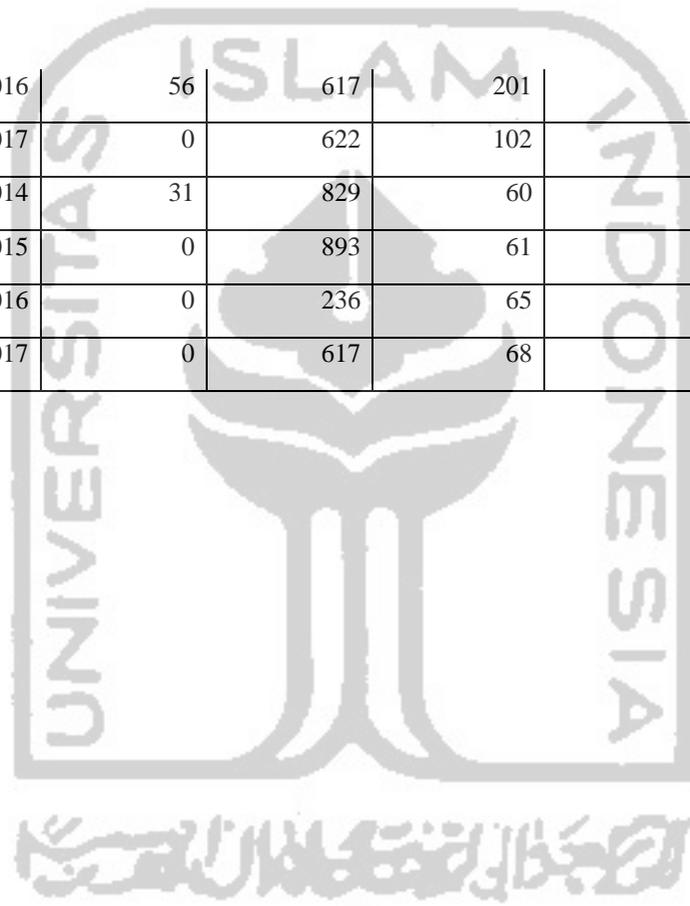
	2017	0	870	134	1004
Bank BRI	2014	0	497	34	531
	2015	95	412	95	602
	2016	0	590	83	673
	2017	0	496	105	601
Bank BTN	2014	85	880	32	997
	2015	0	723	75	798
	2016	0	369	58	427
	2017	113	1071	76	1260
Bank Mandiri	2014	67	530	35	632
	2015	140	325	47	512
	2016	90	400	54	544
	2017	0	635	22	657
Indo Farma	2014	0	518	58	576
	2015	43	537	53	633
	2016	26	670	25	721

	2017	41	554	48	643
Jasa Marga	2014	0	753	34	787
	2015	0	686	37	723
	2016	0	757	34	791
	2017	0	759	34	793
Kimia Farma	2014	0	72	13	85
	2015	43	264	9	316
	2016	50	135	49	234
	2017	46	375	21	442
Krakatau Steel	2014	54	502	40	596
	2015	0	149	47	196
	2016	0	162	18	180
	2017	53	106	103	262
Perusahaan Gas Negara	2014	145	1621	19	1785
	2015	197	1340	19	1556
	2016	104	1532	19	1655

	2017	216	1414	19	1649
Bukit Asam	2014	124	583	18	725
	2015	124	561	16	701
	2016	45	840	26	911
	2017	0	792	24	816
Pembangunan Perumahan	2014	0	817	34	851
	2015	0	816	58	874
	2016	0	850	53	903
	2017	0	745	86	831
Semen Baturaja	2014	47	106	22	175
	2015	0	719	0	719
	2016	0	378	37	415
	2017	0	377	32	409
Timah	2014	135	586	31	752
	2015	69	456	0	525

	2016	72	974	13	1059
	2017	0	1815	61	1876
Telkom Indonesia	2014	0	310	43	353
	2015	0	320	32	352
	2016	0	803	40	843
	2017	97	643	40	780
Wijaya Karya	2014	0	421	10	431
	2015	0	815	13	828
	2016	0	851	11	862
	2017	0	909	16	925
Waskita Karya	2014	0	498	13	511
	2015	0	499	14	513
	2016	0	479	19	498
	2017	0	847	23	870
Garuda Indonesia	2014	66	418	154	638
	2015	41	617	117	775

	2016	56	617	201	874
	2017	0	622	102	724
Semen Indonesia	2014	31	829	60	920
	2015	0	893	61	954
	2016	0	236	65	301
	2017	0	617	68	685



LAMPIRAN 7

Variabel Independen

Praktik Good Corporate Governance

		Indeks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Adhi Karya	2014	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2015	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2016	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2017	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
Aneka Tambang	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Bank BNI	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
	2016	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8

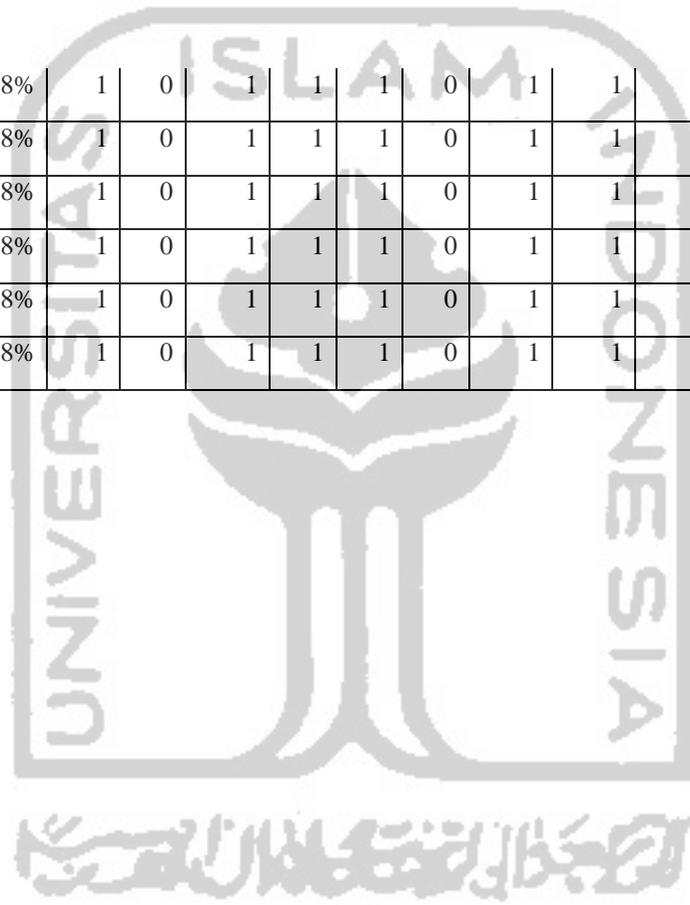
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Bank BRI	2014	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
	2015	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
	2016	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
	2017	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
Bank BTN	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Bank Mandiri	2014	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
	2015	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Indo Farma	2014	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
	2015	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
	2016	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5

	2017	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
Jasa Marga	2014	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Kimia Farma	2014	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
	2015	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
	2016	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
	2017	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
Krakatau Steel	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2016	66,67%	0	0	1	1	1	0	1	1	1	6
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Perusahaan Gas Negara	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7

	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Bukit Asam	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Pembangunan Perumahan	2014	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
	2015	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2016	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Semen Baturaja	2014	66,67%	0	1	1	1	0	0	1	1	1	6
	2015	66,67%	0	1	1	1	0	0	1	1	1	6
	2016	66,67%	0	1	1	1	0	0	1	1	1	6
	2017	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
Timah	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7

	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	0	1	1	1	1	0	1	1	1	7
Telkom Indonesia	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
Wijaya Karya	2014	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
	2015	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2016	55,56%	1	0	1	0	0	0	1	1	1	5
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Waskita Karya	2014	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2015	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2016	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Garuda Indonesia	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7

	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Semen Indonesia	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7



LAMPIRAN 8

Variabel Independen

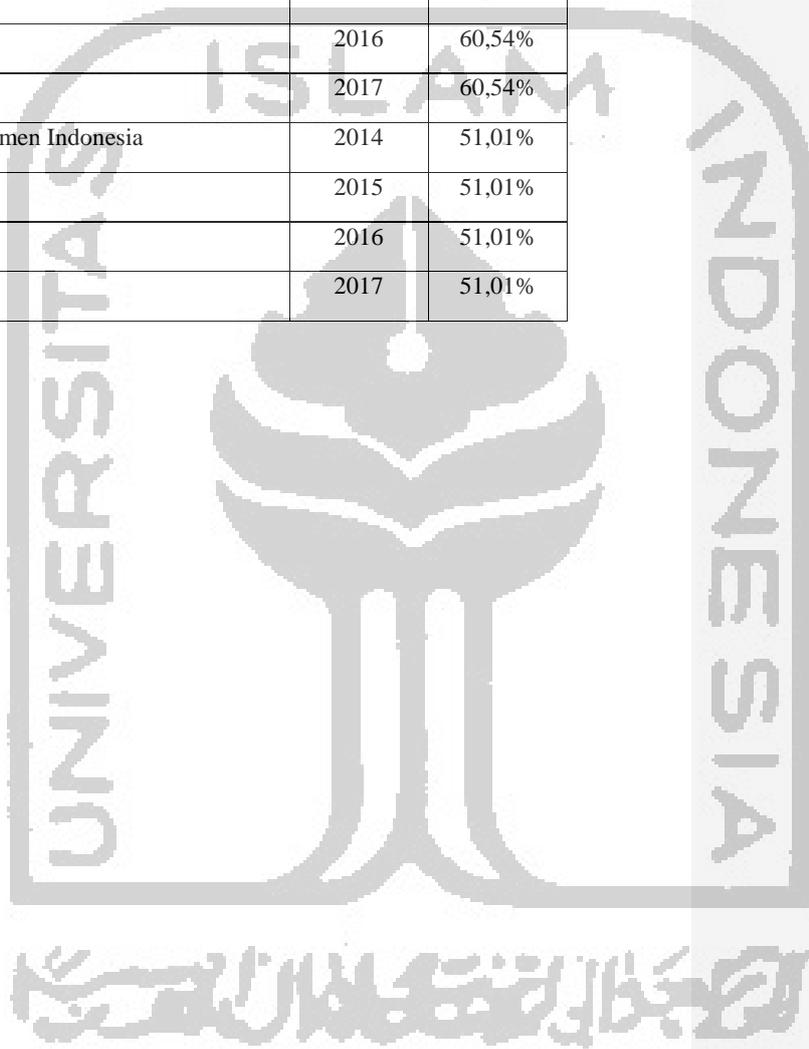
Kepemilikan Pemerintah

Adhi Karya	2014	51%
	2015	51%
	2016	51%
	2017	51%
Aneka Tambang	2014	65%
	2015	65%
	2016	65%
	2017	65%
Bank BNI	2014	60%
	2015	60%
	2016	60%
	2017	60%
Bank BRI	2014	56,75%
	2015	56,75%
	2016	56,75%
	2017	56,75%
Bank BTN	2014	60,13%
	2015	60,04%
	2016	60%
	2017	60%
Bank Mandiri	2014	60%
	2015	60%

	2016	60%
	2017	60%
Indo Farma	2014	80,66%
	2015	80,66%
	2016	80,66%
	2017	80,66%
Jasa Marga	2014	70%
	2015	70%
	2016	70%
	2017	70%
Kimia Farma	2014	90,03%
	2015	90,03%
	2016	90,03%
	2017	90,03%
Krakatau Steel	2014	80%
	2015	80%
	2016	80%
	2017	80%
Perusahaan Gas Negara	2014	56,96%
	2015	56,96%
	2016	56,96%
	2017	56,96%
Bukit Asam	2014	65,02%
	2015	65,02%
	2016	65,02%

	2017	65,01%
Pembangunan Perumahan	2014	51%
	2015	51%
	2016	51%
	2017	51%
Semen Baturaja	2014	76,24%
	2015	76,24%
	2016	76,24%
	2017	75,57%
Timah	2014	65%
	2015	65%
	2016	65%
	2017	65%
Telkom Indonesia	2014	52,56%
	2015	52,55%
	2016	52,09%
	2017	52,09%
Wijaya Karya	2014	65,05%
	2015	65,05%
	2016	65,05%
	2017	65,05%
Waskita Karya	2014	67,33%
	2015	66,04%
	2016	66,04%
	2017	66,04%

Garuda Indonesia	2014	60,50%
	2015	60,51%
	2016	60,54%
	2017	60,54%
Semen Indonesia	2014	51,01%
	2015	51,01%
	2016	51,01%
	2017	51,01%



LAMPIRAN 9

Variabel Independen

Kekuatan Dewan Direksi

Adhi Karya	2014	1
	2015	0
	2016	1
	2017	1
Aneka Tambang	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Bank BNI	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Bank BRI	2014	0
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Bank BTN	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Bank Mandiri	2014	1
	2015	1

	2016	1
	2017	1
Indo Farma	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Jasa Marga	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Kimia Farma	2014	0
	2015	1
	2016	0
	2017	1
Krakatau Steel	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Perusahaan Gas Negara	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	0
Bukit Asam	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1

Pembangunan Perumahan	2014	0
	2015	0
	2016	1
	2017	1
Semen Baturaja	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	1
Timah	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Telkom Indonesia	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Wijaya Karya	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Waskita Karya	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Garuda Indonesia	2014	1
	2015	1

	2016	1
	2017	1
Semen Indonesia	2014	1
	2015	1
	2016	0
	2017	1

Keterangan:

1 = Direksi yang mempunyai saham pada perusahaan

0 = Direksi yang tidak mempunyai saham pada perusahaan

LAMPIRAN 10

Variabel Kontrol

Tipe Industri

Adhi Karya	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Aneka Tambang	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Bank BNI	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Bank BRI	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Bank BTN	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Bank Mandiri	2014	1
	2015	1

	2016	1
	2017	1
Indo Farma	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Jasa Marga	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Kimia Farma	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Krakatau Steel	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Perusahaan Gas Negara	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Bukit Asam	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0

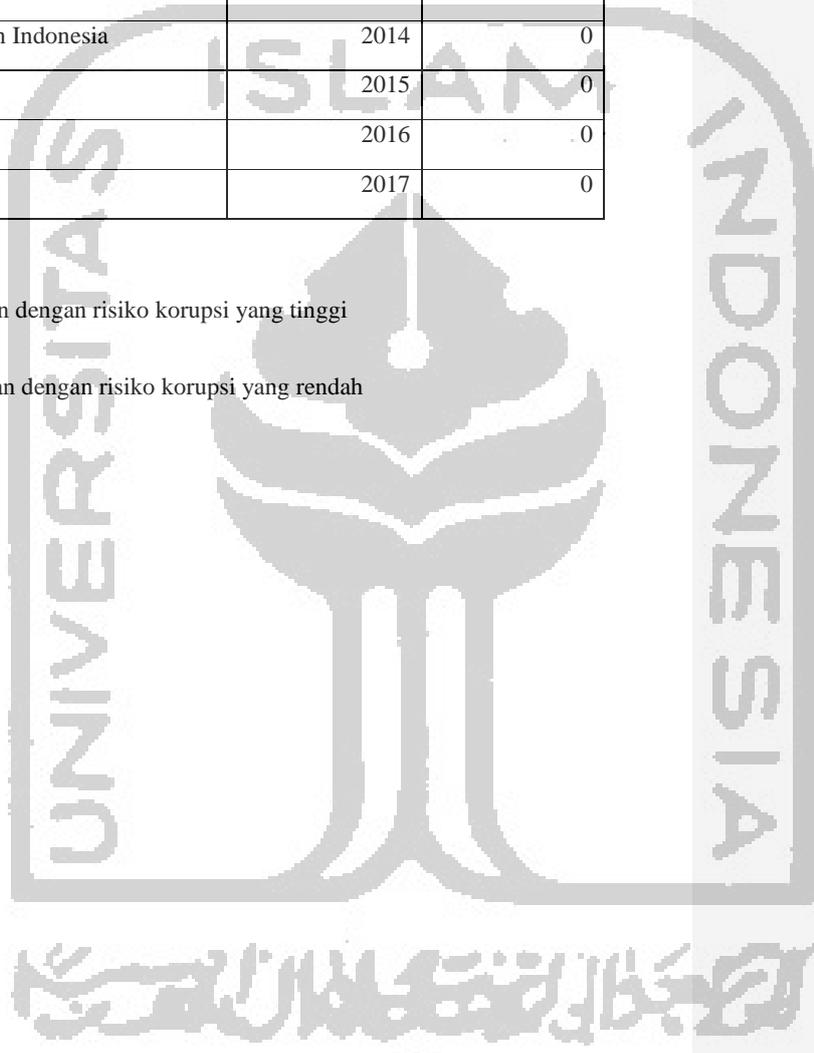
Pembangunan Perumahan	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Semen Baturaja	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Timah	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Telkom Indonesia	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Wijaya Karya	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Waskita Karya	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Garuda Indonesia	2014	1
	2015	1

	2016	1
	2017	1
Semen Indonesia	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0

Keterangan:

1 = Perusahaan dengan risiko korupsi yang tinggi

0 = Perusahaan dengan risiko korupsi yang rendah



LAMPIRAN 11

Variabel Kontrol
Kinerja Keuangan

Adhi Karya	2014	3,24%
	2015	3,42%
	2016	1,71%
	2017	2,14%
Aneka Tambang	2014	-3,53%
	2015	-5,50%
	2016	0,21%
	2017	0,46%
Bank BNI	2014	2,70%
	2015	1,98%
	2016	2,05%
	2017	2,10%
Bank BRI	2014	3,40%
	2015	3,02%
	2016	2,79%
	2017	0,48%
Bank BTN	2014	0,81%
	2015	0,29%
	2016	0,34%
	2017	0,32%
Bank Mandiri	2014	2,60%

	2015	2,40%
	2016	1,50%
	2017	1,98%
Indo Farma	2014	0,09%
	2015	0,76%
	2016	-1,51%
	2017	-0,07%
Jasa Marga	2014	4,04%
	2015	3,85%
	2016	4,00%
	2017	3,16%
Kimia Farma	2014	8,70%
	2015	8,15%
	2016	6,92%
	2017	6,20%
Krakatau Steel	2014	-6,36%
	2015	-10,80%
	2016	-4,67%
	2017	-2,15%
Perusahaan Gas Negara	2014	14,31%
	2015	6,66%
	2016	4,57%
	2017	2,26%
Bukit Asam	2014	15,25%
	2015	12,85%
	2016	10,86%

	2017	20,72%
Pembangunan Perumahan	2014	3,94%
	2015	5,01%
	2016	4,57%
	2017	4,72%
Semen Baturaja	2014	11,65%
	2015	11,43%
	2016	6,78%
	2017	3,11%
Timah	2014	7,53%
	2015	1,07%
	2016	2,68%
	2017	4,69%
Telkom Indonesia	2014	15,95%
	2015	15,19%
	2016	16,87%
	2017	17,30%
Wijaya Karya	2014	1,95%
	2015	3,26%
	2016	5,43%
	2017	3,53%
Waskita Karya	2014	4,70%
	2015	4,89%
	2016	3,95%
	2017	5,27%

Garuda Indonesia	2014	-12,33%
	2015	2,55%
	2016	0,26%
	2017	-5,71%
Semen Indonesia	2014	17,12%
	2015	12,49%
	2016	11,01%
	2017	4,38%

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 كليات جامعة إندونيسيا الإسلامية

LAMPIRAN 12

Variabel Kontrol

Ukuran Perusahaan

Adhi Karya	2014	10.458.881.684.274
	2015	16.761.063.514.879
	2016	20.095.435.959.279
	2017	28.332.948.012.950
Aneka Tambang	2014	22.044.202.220.000
	2015	30.356.850.890.000
	2016	29.981.535.812.000
	2017	30.014.273.452.000
Bank BNI	2014	416.573.708.000.000
	2015	508.595.288.000.000
	2016	603.031.880.000.000
	2017	709.330.084.000.000
Bank BRI	2014	801.955.021.000.000
	2015	878.426.312.000.000
	2016	1.003.644.426.000.000
	2017	11.126.248.442.000.000
Bank BTN	2014	144.575.961.000.000
	2015	171.807.592.000.000
	2016	214.168.479.000.000
	2017	261.365.267.000.000
Bank Mandiri	2014	855.039.673.000.000
	2015	910.063.409.000.000

	2016	1.038.706.009.000.000
	2017	1.124.700.847.000.000
Indo Farma	2014	1.248.343.275.406
	2015	921.548.277.156
	2016	1.381.633.321.120
	2017	1.203.169.923.100
Jasa Marga	2014	31.857.947.989.000
	2015	36.724.982.487.000
	2016	53.500.322.659.000
	2017	79.192.772.790.000
Kimia Farma	2014	2.968.184.626.297
	2015	3.236.224.000.000
	2016	4.612.562.541.064
	2017	6.096.148.972.533
Krakatau Steel	2014	32.163.279.894.000
	2015	50.815.628.544.000
	2016	52.629.916.097.000
	2017	55.461.923.280.000
Perusahaan Gas Negara	2014	76.935.413.931.702
	2015	89.150.675.554.486
	2016	91.365.791.029.192
	2017	84.831.378.798.680
Bukit Asam	2014	14.812.023.000.000
	2015	16.894.043.000.000
	2016	18.576.774.000.000

	2017	21.987.482.000.000
Pembangunan Perumahan	2014	14.611.864.850.970
	2015	19.128.811.782.419
	2016	31.232.766.567.390
	2017	41.782.780.915.111
Semen Baturaja	2014	2.926.360.857.000
	2015	3.268.667.933.000
	2016	4.368.876.996.000
	2017	5.060.337.247.000
Timah	2014	9.752.477.000.000
	2015	9.279.683.000.000
	2016	9.548.631.000.000
	2017	11.876.309.000.000
Telkom Indonesia	2014	140.895.000.000.000
	2015	166.173.000.000.000
	2016	179.611.000.000.000
	2017	198.484.000.000.000
Wijaya Karya	2014	15.915.162.000.000
	2015	11.170.044.734.000
	2016	31.096.539.490.000
	2017	45.683.774.302.000
Waskita Karya	2014	12.542.041.344.848
	2015	30.309.111.177.468
	2016	61.425.181.722.030
	2017	97.895.760.838.624

Garuda Indonesia	2014	38.381.900.175.684
	2015	45.433.210.793.836
	2016	49.967.565.174.910
	2017	50.729.177.413.640
Semen Indonesia	2014	34.314.668.027.000
	2015	38.153.118.932.000
	2016	44.226.895.982.000
	2017	48.963.502.966.000

Keterangan: dalam satuan rupiah penuh



LAMPIRAN 13

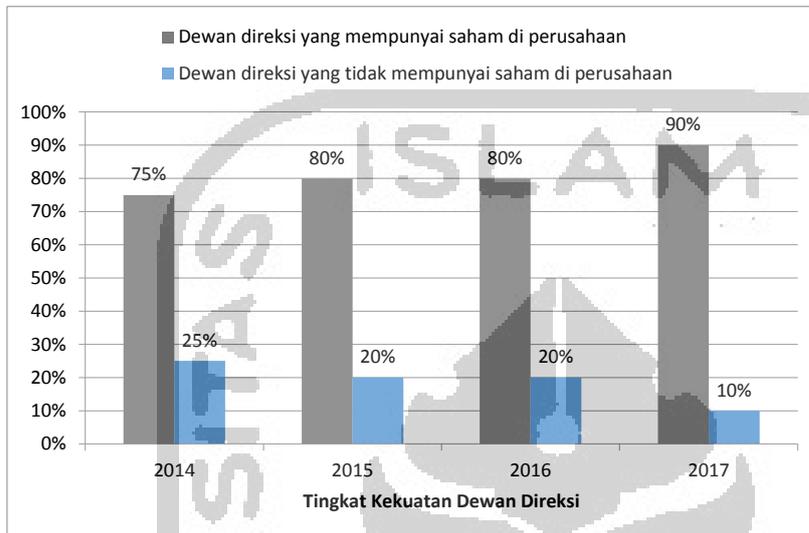
OUTPUT SPSS

Statistik Deskriptif Variabel Independen diukur secara *Continuous*

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Praktik <i>Good corporate governane</i>	80	,56	,89	,7375	,09882
Kepemilikan pemerintah	80	,51	,90	,6414	,10572

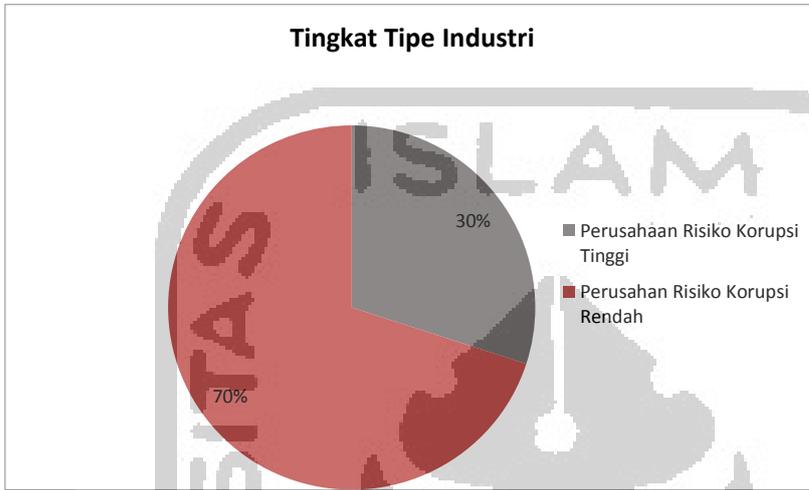
Statistik Deskriptif Variabel Independen diukur secara *Kategorikal*



Statistik Deskriptif Variabel Kontrol diukur secara *Continuous*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Dev
Ukuran Perusahaan (dalam jutaan rupiah)	80	921.548	11.126.24 8.442	291.113.2 00	1.257.964.2 00
Kinerja keuangan- (ROA years average)	80	-12,33%	20,72%	4,17%	6,087%

Statistik Deskriptif Variabel Kontrol diukur secara Kategorikal



Statistik Deskriptif Variabel Dependen diukur secara *Continuous*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Dev
Pelaporan Anti Korupsi (dalam kata)	80	28	1876	706	365,96239

Tabel Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
--	-------------------------

N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,64758771
Most Extreme Differences	Absolute	,137
	Positive	,082
	Negative	-,137
Kolmogorov-Smirnov Z		1,227
Asymp. Sig. (2-tailed)		,098

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7,199	,529		13,611	,000		
good corporate governance	1,671	,796	,335	2,101	,039	,427	2,343
kepemilikan pemerintah	1,310	,516	,286	2,541	,013	,855	1,170
kekuatan dewan direksi	,340	,295	,144	1,153	,253	,693	1,443
tipe industri	-,114	,316	-,057	-,360	,720	,438	2,281
ukuran perusahaan	,018	,080	,045	,225	,822	,268	3,729
kinerja keuangan	1,289	1,264	,107	1,020	,311	,984	1,017

a. Dependent Variable: tingkat pelaporan anti korupsi

Heteroskedasitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,285	,316		,902	,370

good corporate governance	-,412	,475	-,145	-,868	,388
kepemilikan pemerintah	-,560	,308	-,214	-1,817	,073
kekuatan dewan direksi	-,245	,176	-,182	-1,390	,169
tipe industri	-,022	,189	-,019	-,114	,909
ukuran perusahaan	-,022	,048	-,097	-,463	,645
kinerja keuangan	-,559	,755	-,081	-,740	,462

a. Dependent Variable: ABS_RES

Tabel Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,777	6	1,463	3,223	,007 ^b
	Residual	33,130	73	,454		
	Total	41,907	79			

a. Dependent Variable: tingkat pelaporan anti korupsi

b. Predictors: (Constant), kinerja keuangan, kepemilikan pemerintah , kekuatan dewan direksi , tipe industri, good corporate governance, ukuran perusahaan

Tabel Hasil Uji R

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,458 ^a	,209	,144	,67368

a. Predictors: (Constant), kinerja keuangan, kepemilikan pemerintah , kekuatan dewan direksi , tipe industri, good corporate governance, ukuran perusahaan

Tabel Hasil Uji T

Coefficients^a

Model\	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,199	,529		13,611	,000
good corporate governance	1,671	,796	,335	2,101	,039
kepemilikan pemerintah	1,310	,516	,286	2,541	,013
kekuatan dewan direksi	,340	,295	,144	1,153	,253
tipe industry	-,114	,316	-,057	-,360	,720
ukuran perusahaan	,018	,080	,045	,225	,822
kinerja keuangan	1,289	1,264	,107	1,020	,311

- a. Dependent Variable: tingkat pelaporan anti korupsi

LAMPIRAN 14

VERIFIKASI DATA

Sebelum melakukan uji analisis statistik, dilakukan verifikasi data untuk memastikan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian. Langkah yang dilakukan antara lain, verifikasi data Variabel Dependen, Variabel Independen, dan Variabel kontrol yang diperoleh dari Laporan Tahunan dan verifikasi data yang dimasukkan dalam file excel.

1. Verifikasi data Variabel Dependen, Independen, dan Kontrol yang diperoleh dari laporan tahunan dan sustainability report.

Satu mahasiswa S1 jurusan akuntansi diminta untuk melakukan input ulang data poin dari variabel dependen, variabel independen, dan

variabel kontrol dari 8 laporan tahunan (10% dari jumlah sampel). Data poin yang diinput sebanyak 178 terdiri dari pelaporan anti korupsi G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5, praktik *good corporate governance*, kekuatan dewan direksi, kepemilikan pemerintah, tipe industri, kinerja keuangan, ukuran perusahaan, total asset 2013 sampai 2017 dan *net income after tax*. Hasil verifikasi kemudian dibandingkan dengan data yang telah diambil oleh peneliti. Adapun tingkat kesepakatan yaitu, 90%.

2. Verifikasi data yang dimasukkan dalam file excel

Hasil verifikasi data file excel input ulang data variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol kemudian dibandingkan dengan file excel yang telah disusun oleh peneliti. Adapaun dari total keseluruhan data poin dari variabel dependen, independen, dan kontrol yang telah diverifikasi terdapat kesalahan yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 5,62%. Kesalahan tersebut masih dibawah tingkat kesepakatan yaitu dibawah 10%. Kemudian kesalahan tersebut telah dilakukan pembenaran data.

